

**SINGKAWANG  
HEBAT!**



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



**PEMERINTAH  
KOTA SINGKAWANG**

---

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Singkawang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2018-2022, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung berkaitan antara dana Pemerintah yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Tahun 2020 ini merupakan tahun ketiga masa tugas Wali Kota Singkawang periode tahun 2018-2022. Masih banyak hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan dalam hal pelayanan publik pada khususnya. Namun demikian masih ada juga hal-hal yang belum terwujud sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Singkawang untuk bekerja lebih keras lagi pada tahun berikutnya.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Dengan demikian Pemerintah Kota Singkawang sangat mengharapkan adanya

kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Singkawang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Atas keberhasilan Pemerintah Kota Singkawang

Singkawang, Maret 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,



**TJHAI CHUI MIE, S.E, M.H.**



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
INSPEKTORAT KOTA SINGKAWANG**

**Jalan Aliyang Singkawang 79123  
Telp (0562) 631767 Faxes (0562) 631767**

Email : inspektorat @singkawangkota.co.id website: www.singkawangkota.go.id

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Kinerja ini.

Singkawang, 15 Maret 2021

**Inspektur,**



**SITI KODAM MARIANA, SIP,MSi**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670717 198803 2 010**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM .....	1
1. Pendahuluan .....	1
2. Susunan Organisasi .....	6
3. Tugas dan Fungsi .....	9
4. Sumber Daya Aparatur .....	13
5. Sumber Daya Keuangan .....	13
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) ...	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....	17
A. RENCANA STRATEGIS .....	17
1. Visi .....	18
2. Misi .....	18
3. Tujuan dan Sasaran Strategis ..	18
B. PRIORITAS DAERAH .....	24
C. PERJANJIAN KINERJA .....	26
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG .....	29
B. REALISASI ANGGARAN .....	111
BAB IV : PENUTUP .....	114
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* tidaklah dapat berjalan dengan sendirinya tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, tetapi melibatkan *private sector* dan masyarakat dalam mengawal dan menggiring pemerintahan kearah berlangsungnya *good governance* terutama penyelenggaraan penyediaan *public good and service*. Koordinasi yang baik, integritas dan profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi diharapkan mampu menghasilkan *output* penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif. Mekanisme juga diperlukan dalam hal meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, dan memperkuat peran serta legislatif baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, regulasi serta kerjasama pengambilan kebijakan strategis.

Sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik, maka setiap pemerintahan wajib berakuntabilitas. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menyatakan "Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana Pasal 21, Bupati/Wali Kota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang terukur dan memadai. Sebagai alat kendali, penilai kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*, maka Laporan Kinerja dalam prespektif yang lebih luas berfungsi sebagai media informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja pemerintah yang telah dan seharusnya tercapai.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 ini juga merupakan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Wali Kota Singkawang kepada Presiden Republik Indonesia yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
- n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3);
- o. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

- p. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 9);
- q. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022;
- r. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 20);
- s. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 23).

### **1.1 Aspek Geografis**

Kota Singkawang terletak pada wilayah Utara Provinsi Kalimantan Barat pada titik koordinat  $0^{\circ} 44' 55,85''$  -  $01^{\circ} 01' 21,51''$  Lintang Utara dan  $108^{\circ} 51' 47,6''$  -  $109^{\circ} 10' 19''$  Bujur Timur, dengan luas wilayah  $504,00 \text{ Km}^2$  atau sekitar 0,34% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna

Letak Kota Singkawang berada pada jalur lintasan antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, menjadikan Kota Singkawang sebagai sentral *suply* dan *demand*. Secara ekonomis hal tersebut sangat menguntungkan karena memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian, baik sektor perdagangan, jasa, maupun

sektor lainnya sehingga membuka peluang lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat.

## 1.2 Aspek Demografi

Adapun dari sisi demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, jumlah penduduk Kota Singkawang tertanggal 31 Desember 2020 sebanyak 238.483 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, terdiri dari laki-laki berjumlah 121.822 jiwa dan perempuan berjumlah 116.661 jiwa dengan sebaran penduduk di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2  
**Penduduk Kota Singkawang Tahun 2020**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran per Kecamatan**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Singkawang Timur	12.536	11.291	23.827
2.	Singkawang Tengah	36.216	35.391	71.607
3.	Singkawang Barat	28.368	27.907	56.275
4.	Singkawang Utara	15.836	15.354	31.190
5.	Singkawang Selatan	28.866	26.718	55.584
	<b>Jumlah</b>	<b>121.822</b>	<b>116.661</b>	<b>238.483</b>

*Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang*

Berdasarkan data kependudukan di atas maka kepadatan penduduk Kota Singkawang pada tahun 2020 berkisar 473,18 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana penyebarannya masih belum merata. Penyebaran penduduk tersebut terpusat di wilayah perkotaan antara lain di wilayah Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat. Untuk lebih jelasnya komposisi kepadatan penduduk Kota Singkawang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

**Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Kepadatan  
Per Kecamatan Kota Singkawang Tahun 2020**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk	
			Jumlah	Kepadatan Jiwa/Km <sup>2</sup>
1	Singkawang Timur	166,26	23.827	143,31
2	Singkawang Tengah	31,57	71.607	2.268,19
3	Singkawang Barat	15,04	56.275	3.741,69
4	Singkawang Utara	66,65	31.190	467,97
5	Singkawang Selatan	224,48	55.584	247,61
<b>Jumlah</b>		<b>504</b>	<b>238.483</b>	<b>473,18</b>

*Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, diolah oleh Bagian Organisasi Setda Kota Singkawang*

## 2. Susunan Organisasi

Sebagai daerah otonom Kota Singkawang memiliki kewenangan mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan pemerintah kota sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang non pelayanan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman

modal, kepemudaaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.

Urusan pilihan merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Bidang yang termasuk dalam urusan pilihan adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi.

Dengan pemisahan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Singkawang sebagai daerah otonom mengemban tugas pembangunan daerah sesuai kewenangan yang telah diberikan, salah satu alat guna mencapai terwujudnya pelayanan masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah dengan penataan kelembagaan yang mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur Pemerintah Kota Singkawang. Tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Kota Singkawang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibantu oleh seorang sekretaris daerah, staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah. Perangkat daerah sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. 15 (lima belas) dinas daerah terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;

- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 4) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
  - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 6) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
  - 7) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - 8) Dinas Lingkungan Hidup;
  - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 10) Dinas Perhubungan;
  - 11) Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - 12) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
  - 13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  - 15) Satuan Polisi Pamong Praja.
5. 4 (empat) badan daerah terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 2) Badan Keuangan Daerah;
  - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Lembaga teknis daerah terdiri dari :
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz
8. 5 (lima) kecamatan terdiri dari:
- 1) Kecamatan Singkawang Barat;
  - 2) Kecamatan Singkawang Tengah;
  - 3) Kecamatan Singkawang Selatan;
  - 4) Kecamatan Singkawang Utara; dan
  - 5) Kecamatan Singkawang Timur.

### **3. Tugas dan Fungsi**

Adapun tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1) Sekretariat Daerah**

Sekretariat daerah merupakan unit kerja yang membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan perangkat daerah serta pelayanan administratif dan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris daerah dibantu oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan serta asisten administrasi umum.

#### **2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan serta mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris DPRD dibantu oleh kepala bagian, kepala sub bagian, dan kelompok jabatan fungsional yang bentuknya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **3) Inspektorat Daerah**

Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, inspektur dibantu oleh sekretaris, inspektur pembantu wilayah, kepala sub bagian, dan kelompok jabatan fungsional yang bentuknya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **4. Dinas Daerah**

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Kepala dinas

mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan serta mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala dinas dibantu oleh sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional yang bentuknya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4) Badan Daerah**

Badan daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Kepala badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala badan dibantu oleh sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang dan

kelompok jabatan fungsional yang bentuknya sesuai ketentuan yang berlaku.

## **5) Pemerintahan Kecamatan**

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **5. Sumber Daya Aparatur**

Dalam melaksanakan tugasnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang didukung aparatur yang berjumlah 3.298 orang, jumlah tersebut belum termasuk tenaga honorer. Adapun komposisi pegawai menurut golongan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1.4  
**Data Pegawai Menurut Golongan**  
**Per 31 Desember 2020**

Data Kepegawaian	Jumlah/ Tahun			
	2017	2018	2019	2020
<b>Golongan IV/a – IV/d</b>	938	909	801	723
<b>Golongan III/a – III/d</b>	1.928	1.915	1.998	2.052
<b>Golongan II/a – II/d</b>	658	531	497	476
<b>Golongan I/a – I/d</b>	63	53	50	47
<b>Jumlah</b>	<b>3.587</b>	<b>3.408</b>	<b>3.346</b>	<b>3.398</b>

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang

## 6. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tahun 2020 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Adapun ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5  
**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Pemerintah Kota Singkawang**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>897.985.277.386,35</b>	<b>832.190.075.398,00</b>	<b>(65.795.201.988,35)</b>	<b>(7,33)</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>161.878.800.000,00</b>	<b>170.362.800.000,00</b>	<b>8.484.000.000,00</b>	<b>5,24</b>
<b>4.1.1</b>	Pendapatan pajak daerah	56.270.000.000,00	45.342.000.000,00	(10.928.000.000,00)	(19,42)
<b>4.1.2</b>	Pendapatan retribusi daerah	6.390.000.000,00	6.312.000.000,00	(78.000.000,00)	(1,22)
<b>4.1.3</b>	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00		
<b>4.1.4</b>	Lain-lain PAD yang sah	94.018.800.000,00	113.508.800.000,00	19.490.000.000,00	20,73
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>649.101.302.000,00</b>	<b>573.459.212.808,00</b>	<b>(75.642.089.192,00)</b>	<b>(11,65)</b>
<b>4.2.1</b>	Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	13.448.253.000,00	14.817.097.000,00	1.368.844.000,00	10,18
<b>4.2.2</b>	Dana Alokasi Umum (DAU)	523.133.242.000,00	467.470.514.000,00	(55.662.728.000,00)	(10,64)
<b>4.2.3</b>	Dana Alokasi Khusus (DAK)	112.519.807.000,00	91.171.601.808,00	(21.348.205.192,00)	(18,97)

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>87.005.175.386,35</b>	<b>88.368.062.590,00</b>	<b>1.362.887.203,65</b>	<b>1,57</b>
<b>4.3.1</b>	Pendapatan hibah	23.449.000.000,00	25.672.200.000,00	2.223.200.000,00	9,48
<b>4.3.3</b>	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	55.103.558.386,35	55.291.203.590,00	187.645.203,65	0,34
<b>4.3.6</b>	Dana Insentif daerah	8.452.617.000,00	7.404.659.000,00	(1.047.958.000,00)	(12,40)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>897.985.277.386,35</b>	<b>832.190.075.398,00</b>	<b>(65.795.201.988,35)</b>	<b>(7,33)</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>932.485.277.386,35</b>	<b>939.296.341.301,17</b>	<b>6.811.063.914,82</b>	<b>0,73</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>442.928.477.170,00</b>	<b>425.480.805.003,78</b>	<b>(17.447.672.166,22)</b>	<b>(3,94)</b>
<b>5.1.1</b>	Belanja pegawai	419.288.088.327,00	367.843.426.236,07	(51.444.662.090,93)	(12,27)
<b>5.1.2</b>	Belanja hibah	17.183.000.000,00	15.328.700.000,00	(1.854.300.000,00)	(10,79)
<b>5.1.3</b>	Belanja bantuan sosial	4.597.048.000,00	1.824.548.000,00	(2.772.500.000,00)	(60,31)
<b>5.1.4</b>	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, pemerintahan desa dan partai politik	860.340.843,00	907.417.740,00	47.076.897,00	5,47
<b>5.1.5</b>	Belanja tidak terduga	1.000.000.000,00	39.576.713.027,71	38.576.713.027,71	3.857,67
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>489.556.800.216,35</b>	<b>513.815.536.297,39</b>	<b>24.258.736.081,04</b>	<b>4,96</b>
<b>5.2.1</b>	Belanja pegawai	87.313.782.424,00	102.802.655.178,00	15.488.872.754,00	17,74
<b>5.2.2</b>	Belanja barang dan jasa	250.675.986.731,35	237.676.131.104,39	(12.999.855.626,96)	(5,19)
<b>5.2.3</b>	Belanja modal	151.567.031.061,00	173.336.750.015,00	21.769.718.954,00	14,36
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>932.485.277.386,35</b>	<b>939.296.341.301,17</b>	<b>6.811.063.914,82</b>	<b>0,73</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(34.500.000.000,00)</b>	<b>(107.106.265.903,17)</b>	<b>(72.606.265.903,17)</b>	<b>210,45</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>34.500.000.000,00</b>	<b>107.106.265.903,17</b>	<b>72.606.265.903,17</b>	<b>210,45</b>
<b>6.1</b>	Penerimaan pembiayaan	43.750.000.000,00	116.356.265.903,17	72.606.265.903,17	165,96
<b>6.1.1</b>	Penggunaan SILPA	12.250.000.000,00	87.356.265.903,17	75.106.265.903,17	613,11
<b>6.1.4</b>	Pinjaman dalam Negeri	31.500.000.000,00	29.000.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(7,94)
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>43.750.000.000,00</b>	<b>116.356.265.903,17</b>	<b>72.606.265.903,17</b>	<b>165,96</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.250.000.000,00</b>	<b>9.250.000.000,00</b>		
<b>6.2.2</b>	Penyertaan modal / investasi pemerintahan daerah	9.250.000.000,00	9.250.000.000,00		
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>9.250.000.000,00</b>	<b>9.250.000.000,00</b>		
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<b>34.500.000.000,00</b>	<b>107.106.265.903,17</b>	<b>72.606.265.903,17</b>	<b>210,45</b>
<b>6.3</b>	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA)				

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

## **B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikembangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Isu-isu strategis pembangunan Kota Singkawang dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah.

Timbulnya permasalahan pembangunan karena adanya perbedaan yang dihasilkan antara indikator capaian kinerja yang harus dapat dicapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah dengan target capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adanya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan biasanya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya kekuatan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal;
- b) Adanya faktor kelemahan yang tidak diantisipasi dan diatasi secara dini serta dicarikan solusinya;
- c) Adanya peluang yang belum dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan secara maksimal; dan
- d) Ancaman yang sejak awal belum mendapatkan alternatif pemecahannya.

Melihat kondisi sampai tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019 maka Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Singkawang tahun 2020 meliputi :

- a) Keberagaman (pluralitas) dalam masyarakat Kota Singkawang berpotensi untuk memicu terjadinya masalah sosial (konflik) jika tidak dikelola dengan baik;
- b) Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum optimal, efektif dan efisien;
- c) Belum sinerginya antara perencanaan dengan penganggaran untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
- d) Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik belum maksimal;

- e) Terbatasnya infrastruktur dasar serta Pembangunan infrastruktur yang belum merata;
- f) Belum tertatanya kawasan perumahan dan permukiman;
- g) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- h) Belum meratanya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;
- i) Masih rendahnya ketahanan pangan daerah;
- j) Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
- k) Belum berkembangnya kreatifitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;
- l) Belum tergalinya pengembangan pariwisata yang berbasis potensi, keunikan dan kearifan lokal;
- m) Belum optimalnya pengelolaan, pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian;
- n) Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan daerah Pemerintah Kota Singkawang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018–2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022.

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program perangkat daerah serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan keuangan daerah dan rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

#### **1. Visi**

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dituangkan dalam RPJMD menjadi dasar dalam perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2018– 2022, menetapkan visinya yaitu “**Singkawang HEBAT 2022**”.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut:

- a. Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya;
- b. Ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
- c. Bersih, tegas, amanah dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;

- d. Adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan;
- e. Terdepan dalam perdagangan, jasa dan pengembangan pariwisata.

## **2. Misi**

Misi dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target visi secara optimal.

Adapun misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata.

## **3. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **a. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Berkaitan dengan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kota Singkawang terkait dengan

pernyataan misi untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan dapat diuraikan dalam matriks keterkaitan antar visi dan misi dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan antara Misi dan Tujuan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis Dan budaya	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Indeks Toleransi
			Persentase peningkatan seni budaya yang lestari
2	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif Dan mandiri	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan ekonomi
			Angka kemiskinan
3	Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat	Meningkatkan Potensi Sumber Daya Pertanian dan Perikanan	Persentase PDRB Sektor Pertanian
			Persentase PDRB Sektor Perikanan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup
4	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
5	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	IPM
6	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks kepuasan pelayanan infrastruktur
7	Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata	PDRB sektor perdagangan
			PAD sektor pariwisata

Tabel 2.2

## Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Indeks Toleransi	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif, dan toleran	1	Angka Kriminalitas
			2	Angka Konflik
	Persentase peningkatan seni budaya yang lestari	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	1	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Daya Saing koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	1	Volume usaha koperasi
			2	Volume usaha umkm
			3	Nilai PDRB sektor industri
			4	Cakupan Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	1	Persentase pertumbuhan nilai realisasi investasi
			Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan	1
2	Angka kemiskinan			
Meningkatkan Potensi Sumber Daya Pertanian dan Perikanan	Persentase PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	1	Persentase PDRB sektor Pertanian (%)
	Persentase PDRB Sektor Perikanan		2	Persentase PDRB Sektor perikanan (%)
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Air
			2	Indeks kualitas udara
			3	indeks tutupan lahan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks kepuasan masyarakat
			2	Indeks SPBE
			3	Nilai LPPD
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Nilai SAKIP
			2	Opini BPK terhadap laporan keuangan
		Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal	1	Maturitas SPIP
<b>Meningkatnya kualitas sumber daya manusia</b>	IPM	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup
		Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka harapan lama sekolah
			2	Angka rata-rata lama sekolah
<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah</b>	Indeks kepuasan pelayanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1	Persentase Jalan mantap (%)
			2	Persentase penduduk berakses air minum (%)
			3	Persentase rumah layak huni
			4	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani
		Menurunnya kawasan genangan banjir	1	Luas kawasan genangan banjir
<b>Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata</b>	PDRB sektor perdagangan	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1	volume usaha perdagangan
	PAD sektor pariwisata	Berkembangnya sektor pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan
			2	rata-rata lama tinggal

## **b. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020**

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah haruslah selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dalam satu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang berpedoman pada:

- a) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang.

Adapun Indikator Kinerja Utamanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB</b>
1	Angka Kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Angka Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang lestari	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Volume Usaha Koperasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
5	Volume Usaha UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
6	Nilai PDRB sektor industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
7	Cakupan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
10	Angka Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Nilai PDRB Sektor Pertanian (%)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
12	Nilai PDRB Sektor Perikanan(%)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
13	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
14	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
15	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup
16	Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah
18	Nilai LPPD	Sekretariat Daerah
19	Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah

<b>20</b>	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Badan Keuangan Daerah
<b>21</b>	Maturitas SPIP	Inspektorat Daerah
<b>22</b>	Angka Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
<b>23</b>	Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>24</b>	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>25</b>	Persentase jalan mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>26</b>	Persentase penduduk berakses air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>27</b>	Persentase rumah layak huni	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
<b>28</b>	Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
<b>29</b>	Luas kawasan genangan banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>30</b>	Volume usaha perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
<b>31</b>	Jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
<b>32</b>	Rata-rata lama tinggal	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis yang lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang 2018-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) level Pemerintah Kota Singkawang dan Perangkat Daerah.

## **B. Prioritas Daerah**

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2020 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun ketiga dari RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang penyusunannya dilakukan melalui 5 (lima) metode pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, 3) Pendekatan Top-Down, (4) Pendekatan Politis,

serta (5) Pendekatan Inovatif, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan RKPD juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

Secara umum arah kebijakan keuangan daerah baik dari sisi kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2020. Arah kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk mengatasi permasalahan mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2020.

Penggunaan APBD Kota Singkawang Tahun 2020 lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Singkawang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Untuk mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka RKPD Kota Singkawang tahun 2020 ditetapkan dengan tema “Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Singkawang Hebat 2022”.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan nasional, Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 serta RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022, maka perencanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2020 menetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan dengan 76 (tujuh puluh enam ) program prioritas.

Adapun 8 (delapan) prioritas pembangunan Tahun 2020 adalah sbb :

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang merata;
2. Peningkatan derajat kesehatan;
3. Penyediaan utilitas dan sarana prasarana public;
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
5. Pemanjapan kinerja aparatun birokrasi;
6. Pengembangan dan penataan kawasan;
7. Pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang; dan
8. Harmonisasi umat beragama dan kebudayaan.

### **C. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 merupakan komitmen melaksanakan amanah dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target kinerja, perjanjian kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja Wali Kota Singkawang Tahun 2020 telah disusun dan ditandatangani oleh Wali Kota. Kinerja ini selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh Perangkat Daerah dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Pemerintah Kota Singkawang berisi indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Perjanjian Kinerja**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif dan toleran	1 Angka Kriminalitas	17
		2 Angka Konflik	0
<b>2</b>	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	1 Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang lestari	80,3
<b>3</b>	Meningkatnya daya saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	1 Volume Usaha Koperasi	Rp 270.728.937.000
		2 Volume Usaha UMKM	Rp 691.340.861.600
		3 Nilai PDRB sektor industri	Rp 1.007.052.947.775
		4 Cakupan Ekonomi Kreatif	56,25
<b>4</b>	Meningkatnya investasi daerah	1 Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	5
<b>5</b>	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	7,45
		2 Angka Kemiskinan	5,00
<b>6</b>	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	1 Nilai PDRB Sektor Pertanian (%)	3,5
		2 Nilai PDRB Sektor Perikanan(%)	1,98
<b>7</b>	Meningkatnya ketahanan pangan dan daerah	1 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	82,00
<b>8</b>	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	1 Indeks Kualitas Air	80,6
		2 Indeks Kualitas Udara	85,6
		3 Indeks Tutupan Lahan	31,75

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
9	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	90
		2 Nilai LPPD	Sangat Tinggi (ST)
		3 Nilai SPBE	2 (cukup)
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	3 Nilai SAKIP	BB
		1 Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
11	Meningkatnya kualitas system pengawasan internal	1 Maturitas SPIP	Level 3
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup	71,89
13	Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Angka Harapan Lama Sekolah	12,9
		2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,78
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1 Persentase jalan mantap (%)	57,5
		2 Persentase penduduk berakses air minum	60
		3 Persentase rumah layak huni	91,25
		4 Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani	85,01
15	Menurunnya kawasan genangan banjir	1 Luas kawasan genangan banjir	3,7% / 2.190 Ha
16	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1 Volume usaha perdagangan	Rp 1.544.478.093.900
17	Berkembangnya sektor pariwisata	1 Jumlah kunjungan wisatawan	200.000
		2 Rata-rata lama tinggal	1,1

Keseluruhan sasaran strategis yang ada dalam Perjanjian Kinerja Kota Singkawang Tahun 2020 diarahkan sebagai penunjang untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang ingin dicapai dalam akhir masa RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang. Pengukuran tingkat capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut merupakan persentase capaian target yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Hasil atas pengukuran kinerja ini dievaluasi untuk mengetahui kegagalan/keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Singkawang.

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Pemerintah Kota Singkawang terhadap 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun perjanjian kinerja Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif dan toleran	1	Angka Kriminalitas	17	8,72	194,95
		2	Angka Konflik	0	0	100
2	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	1	Persentase seni dan cagar budaya yang lestari	80,3	100	124,53
3	Meningkatnya daya saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	1	Volume Usaha Koperasi	270,728,937,000	237,699,347,613	87,80
		2	Volume Usaha UMKM	691,340,861,600	753,658,510,097	109,01
		3	Nilai PDRB sektor industri	1,007,052,947,775	1,009,686,970,000	100,26
		4	Cakupan Ekonomi Kreatif	56,25	100	177,78
4	Meningkatnya investasi daerah	1	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	5	64,19	1283,20
5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan	1	Angka Pengangguran Terbuka	7,45	8,78	84,85
		2	Angka Kemiskinan	5	4,53	110,38
6	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (%)	3,5	0,47	13,42
		2	Nilai PDRB Sektor Perikanan(%)	1,98	-0,10	-5,05
7	Meningkatnya ketahanan pangan dan daerah	1	Skor Pola Pangan Harapan	82	82,89	101,09
8	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Air	80,6	80	99,26
		2	Indeks Kualitas Udara	31,75	85,85	100,29
		3	Indeks Tutupan Lahan	31,75	30,21	95,15
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	83,74	93,04
		2	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	T	90
		3	Indeks SPBE	2	3,82	191

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Nilai SAKIP	BB	n/a	n/a
		2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	n/a	n/a
11	Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal	1	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100,00
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Usia Harapan Hidup	71,89	72,06	100,24
13	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,9	12,9	100,00
		2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,78	7,89	101,41
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1	Persentase jalan mantap (%)	57,5	53,54	93,11
		2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	60	39,17	65,28
		3	Persentase rumah layak huni	91,25	91,17	99,91
		4	Luas kawasan pemukiman kumuh	85,01	88,73	104,38
15	Menurunnya kawasan genangan banjir	1	Luas kawasan genangan banjir	2,190	2.198	99,64
16	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1	Volume usaha perdagangan	1,544,478,09 3,900	1,585,562,47 0,000	102,66
17	Berkembangnya sektor pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	200,000	529,647	264,82
		2	Rata-rata lama tinggal	1.1	0.33	30.00

Hasil pengukuran kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran strategis Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 akan diuraikan sebagai berikut:

## 1. Sasaran Strategis Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Toleran

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dan Toleran	1 Angka Kriminalitas	17	8,72	148,72%
		2 Angka Konflik	0	0	100%
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>124,36%</b>

Indikator Sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran digambarkan melalui indikator angka kriminalitas dan angka konflik. Realisasi kinerja pada indikator angka kriminalitas melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerjanya sebesar 148,72%, sedangkan realisasi kinerja pada indikator angka konflik tercapai sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Secara keseluruhan pencapaian sasaran strategis terwujudnya kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran telah berhasil dilaksanakan dengan hasil capaian rata-rata sebesar 124,36%.

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dan Toleran	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	305.947.900	305.467.900	98,86	124,36	
	Pengembangan wawasan kebangsaan	12.235.525	11.935.525	97,55		
	Pendidikan Politik masyarakat	14.556.150	12.956.150	89,01		
	Pengembangan pendidikan organisasi/lembaga swadaya masyarakat	14.681.500	14.031.500	95,57		
<b>Rata-rata</b>				<b>95,25</b>	<b>124,36</b>	<b>29,11</b>

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 95,25 % dan rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 124,36%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 29,11%

## **2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 4 (empat) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran. Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan capaian kinerja 148,72%, kegiatan:
  - ) Pengendalian Keamanan Lingkungan, yaitu kegiatan patrol kewilayahan dengan capaian 100%.
  - ) Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat capaian kinerja 100%.
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan capaian 100%, kegiatan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dengan capaian 97,55%
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan capaian 100%, kegiatan pendampingan transportasi partai politik dengan capaian 89,01%
4. Program pengembangan Pendidikan organisasi/Lembaga swadaya masyarakat, kegiatan peningkatan kapasitas organisasi/Lembaga swadaya masyarakat dengan capaian 95,57%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Toleran	Angka Kriminalitas	11,83	8,97	8,72	15%
	Angka Konflik	0	0	0	0

Angka kriminalitas yang tertangani merupakan perbandingan antara jumlah tindak kriminal yang tertangani berbanding jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kota Singkawang mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebanyak 237,429. Jumlah tindak kriminal yang tertangani mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 315, tahun 2019 sebanyak 213 dan tahun 2020 sebanyak 207. Dari data diatas, terlihat bahwa angka kriminalitas yang tertangani mengalami penurunan dari 2 (tahun) sebelumnya. Hal ini menunjukkan kriminalitas di Kota Singkawang semakin menurun.

Angka konflik di Kota Singkawang seperti terlihat pada tabel diatas dari tahun ke tahun selalu nihil. Hal ini berharap untuk terus dipertahankan sehingga kehidupan masyarakat semakin kondusif serta toleran.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Berdasarkan data capaian kinerja pada indikator dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran, dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Angka kriminalitas melebihi target dikarenakan:
  - a. Dalam menurunkan angka kriminalitas, berbagai program telah dilaksanakan secara bersinergi yaitu melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Dalam program ini, kegiatan yang banyak dilaksanakan adalah patroli kewilayahan yang dilaksanakan setiap hari pada lokasi yang dianggap rawan.

- b. Untuk beberapa program yang tidak dianggarkan karena adanya pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19, secara tugas dan fungsi tetap berjalan seperti penyelesaian kasus-kasus yang diadukan oleh masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan.
- c. Meningkatkan dan mengoptimalkan citra aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- d. Meningkatkan komunikasi yang aktif dengan baik dengan Perangkat Daerah maupun dengan stakeholder terkait dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- e. Menyiapkan payung hukum terkait pembentukan Linmas

Meskipun kinerja melebihi target, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama akan pentingnya untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan.
- b. Sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong praja masih belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan beban kerja.
- c. Kurangnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- d. Belum optimalnya unit kerja lain dalam memberikan dukungan untuk penyelesaian kasus-kasus tertentu.

## 2. Angka konflik

Kota Singkawang pada tahun 2019 mendapat penghargaan sebagai kota tertoleran No.1 di Indonesia. Angka konflik di Kota Singkawang hingga tahun 2020 sebesar 0 (nol). Hal ini di pengaruhi oleh:

- a. Berjalanya kearifan lokal.
- b. Tingkat toleransi yang tinggi di Kota Singkawang.
- c. Peran aktif forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan (lintas antar etnis),

organisasi masyarakat/LSM dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang kondusif dan bertoleran.

- d. Peran aktif dari pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
- e. Sinergisitas pemerintah, forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran kebangsaan dan instansi vertikal dalam menjaga kondusifitas di Kota Singkawang.
- f. Masyarakat Kota Singkawang memiliki kesadaran politik masyarakat yang cukup tinggi termasuk terhadap kesetaraan gender.
- g. Harmonisasi pelaksanaan pemilu antar unit terkait.

Meskipun kinerja telah tercapai, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi target ini, antara lain:

- a. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak sinkron terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah.
- b. Keberagaman etnis di Kota Singkawang menjadi potensi isu rasisme yang menyebabkan timbulnya konflik sosial apabila tidak terjaga dengan baik.
- c. Belum maksimalnya pendidikan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah karena keterbatasan sumber daya.

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.5  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya	1 Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	80,3	80,33	100%

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya pengembangan kelestarian budaya melalui indikator persentase seni budaya yang lestari dengan realisasi tahun 2020 sebesar 80,3 dari target yang ditetapkan sebesar 80,3 maka capaian target pada sasaran strategis ini adalah sebesar 100 %.

## 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya	Pengembangan Nilai Budaya	44.918.000	44.918.000	100	100	
	Pengelolaan Kekayaan Budaya	212.010.000	205.155.000	96,77		
	Pengelolaan Keragaman Budaya	32.040.000	32.040.000	100		
Rata-rata				98,92	100	1,08

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,92 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya terjadi efisiensi sebesar 1,08 %.

## 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang mendukung untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pengembangan kelestarian budayadengan capaian 100% dilaksanakan melalui program:

- a. Program Pengembangan nilai budaya, dengan capaian kinerja sebesar 100 % melalui kegiatanPelestarian dan akutalisasi adat budaya daerah, dengan capaian 100%.
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya, dengan capaian kinerja sebesar 100 % melalui kegiatanPenyusunan sistem informasi data base bidang budaya, dengan capaian 100%.

Namun masih terdapat program yang capainnya belum sampai 100% dan kurang tepat dalam mencapai sasaran strategis yaitu program pengelolaan keragaman budaya, dengan capaian kinerja sebesar 90,77 %, melalui kegiatan:

- a. Perekaman dan digitalisasi bahan Pustaka, capaian 99,99%.
- b. Operasional mobil bioskop keliling, capaian 81,55%

**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya	Persentase Seni dan Budaya Yang Lestari	100%	100%	100%	70%

Berdasarkan tabel di atas, apabila dilihat dari capaian kinerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sudah semua objek kebudayaan dan cagar budaya yang dimiliki daerah dilestarikan yaitu sebanyak 155. Hal ini telah melebihi dari target RPJMD tahun 2022 sebesar 70%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Persentase situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, telah memenuhi target sebesar 100% dikarenakan:

1. Kegiatan fasilitasi pengembangan seni budaya lokal melalui kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), yaitu dengan membangun jaringan antar kota yang bertujuan untuk menjaga kelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) peninggalan sejarah.
2. Selalu meningkatkan koordinasi dengan lembaga pusat yang menangani dan menetapkan objek sebagai cagar budaya.
3. Melakukan pembinaan kepada kelompok pencinta cagar budaya.
4. Melakukan perlindungan terhadap objek yang diduga cagar budaya yang dimiliki oleh pihak swasta atau individu.
5. Memberikan bantuan dan pembinaan kepada paguyuban seni dan budaya.
6. Meningkatkan aktualisasi pagelaran seni oleh paguyuban dan kelompok seni lainnya.
7. Berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kapabilitas sumber daya pengelola benda, situs dan kawasan cagar budaya melalui peningkatan pengetahuan dan pengembangan kompetensi.

Meskipun kinerja telah tercapai memenuhi target, masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum adanya kebijakan daerah tentang perlindungan penetapan objek sebagai cagar budaya.
2. Masih kurangnya kuantitas SDM pada unit kerja pengampu urusan kebudayaan
3. Rendahnya kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya.
4. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan karena belum terpenuhinya syarat yang ditentukan terutama belum terbentuknya tim ahli cagar budaya (TABC) sehingga objek cagar budaya belum dapat dimanfaatkan atau dikembangkan dengan baik.
5. Belum ada penetapan objek cagar budaya daerah yang disebabkan belum tersedianya tenaga ahli di tingkat daerah.
6. Masih adanya pemahaman yang lemah dari kelompok masyarakat/individu tertentu terhadap pelestarian cagar budaya.
7. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelestarian kebudayaan.
8. Ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan.

### 3. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif

#### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.8  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	1	Volume Usaha Koperasi	Rp.270.728.937.000	Rp.237.699.347.613	87,80
		2	Volume Usaha UMKM	Rp.691.340.861.600	Rp.753.658.510.097	109,01
		3	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp.1.007.052.947.775	Rp.1.009.686.970.000	100,26

		4	Cakupan Ekonomi Kreatif	56,25	100	177,78
Rata-rata						118,71

Dalam mencapai sasaran strategis ke 3 yaitu meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, industri dan ekonomi kreatif diukur melalui 4 (empat) indikator. Indikator pertama adalah volume usaha koperasi dengan target Rp.270.728.937.000, pada akhir tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.237.699.347.613 sehingga capaiannya adalah 87,80%.

Indikator kedua yaitu volume usaha UMKM yang realisasinya tahun 2020 sebesar Rp.753.658.510.097 melebihi dari target yang telah ditetapkan Rp.691.340.861.600 sehingga capaiannya adalah 109,01 %.

Indikator ketiga yaitu Nilai PDRB sektor industri dengan target tahun 2020 sebesar Rp.1.007.052.947.775 realisasinya adalah Rp.1.007.052.947.775 sehingga capaiannya 100,26 %.

Indikator keempat adalah cakupan ekonomi kreatif dengan target tahun 2020 sebesar 56,25 %, realisasinya mencapai 100% sehingga capaiannya menjadi 177,78 %. Dari keseluruhan indikator pada sasaran meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, industri dan ekonomi kreatif secara rata-rata capaiannya adalah 118,71 %.

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	192.077.400	159.892.700	83,24	118,71	
	Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif	387.643.500	380.519.150	98,16		
	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	417.358.000	378.217.775	90,62		
	Pengembangan	39.470.200	39.166.450	99,23		

sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah				
Peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi	155.939.000	141.535.400	90,76	
Pengembangan industri kecil dan menengah	330.559.000	322.320.050	97,51	
Penataan struktur industri	659.599.400	653.380.600	99,06	
Pengembangan Ekonomi Kreatif	365.079.585	306.491.000	84	
<b>Rata-rata</b>			<b>92</b>	<b>118,71</b>
				<b>26,71</b>

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 92% dan rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 118,71 %, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 26,71%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

## **2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 7 (tujuh) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, industri dan ekonomi kreatif.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu:

- a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
  1. Pembinaan, pengasawan dan penghargaan koperasi berprestasi capaian 100%.
  2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian 100%.
- b. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan:

1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan capaian 100%.
2. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD capaian 100%.
- c. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemantuan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah capaian 100%.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan pelatihan pengolahan pangan capaian 100%.
- e. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan capaian 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
  1. Penyusunan data base usaha mikro kecil capaian 100%
  2. Fasilitasi sarana usaha bagi pelaku usaha mikro kecil capaian 100%.
- f. Program Pengembangan industri kecil menengah dengan capaian 100 %, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
  1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri capaian 100%.
  2. Fasilitasi Kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta capaian 100%.
  3. Pemberian bantuan mesin dan peralatan IKM capaian 100%.
  4. Promosi produk IKM capaian 100%.
- g. Program Pengembangan Ekonomi kreatif dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
  1. Fasilitasi komunikasi ekraf singkawang capaian 33,3%.
  2. Pengembangan SDM Ekraf berbasis MDI capaian 100%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.10  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	Volume Usaha Koperasi	Rp 356.313. 893.905	Rp255.404.657. 566	Rp. 237.699.347.61 3	Rp. 385.316. 690.100
	Volume Usaha UMKM	Rp578.596.014. 000	Rp737.771. 510.097	Rp.753.658.510. 097	Rp. 618.454. 199.900
	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp. 1.365.096. 700.000	Rp. 1.449.967. 880.000	Rp. 1.009.686.970.0 00	Rp. 1.110.275. 874.922
	Cakupan Ekonomi Kreatif	41,67	75	100	93,75

Pada table diatas, dapat terlihat bahwa:

1. Adanya trend penurunan volume usaha koperasi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Penurunan volume usaha koperasi tahun 2020 dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 17.705.309.953. Penurunan volume usaha koperasi masih jauh dari target RPJMD.
2. Adanya trend peningkatan volume usaha UMKM yang cukup signifikan pada tahun 2019, dan tahun 2020 terdapat sedikit peningkatan. Volume usaha UMKM pada tahun 2020 telah melebihi target pada akhir tahun RPJMD.
3. Adanya penurunan nilai PDRB sektor Industri dari tahun sebelumnya. Sehingga belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD.
4. Adanya peningkatan cakupan ekonomi kreatif pada tahun 2019 dan tahun 2020. Adanya peningkatan ekonomi kreatif yang ditangani. Pada tahun 2019, terdapat 9 sub sektor yang ditangani dari 12 sub sektor yang ada di Kota Singkawang. Pada tahun 2020, jumlah sub sektor yang ada di Kota Singkawang sebanyak 16 sub sektor dan sudah tertangani semua.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

1. Indikator volume usaha koperasi, tidak memenuhi target dikarenakan beberapa sebagai berikut:
  - a. Masih terdapat koperasi tidak secara aktif menjalankan usaha koperasi. Dari 104 koperasi yang aktif hanya 68 koperasi.
  - b. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pembina koperasi dalam menangani pembinaan koperasi.
  - c. Lemahnya kompetensi sumber daya manusia pengurus koperasi.
  - d. Pengelolaan koperasi oleh pengurus belum menjadi prioritas utama sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan koperasi yang ada.
  - e. Lemahnya kaderisasi dalam pengurusan kelembagaan koperasi.
  - f. Rendahnya kompetensi kelembagaan dan organisasi koperasi, hal ini ditunjukkan masih rendahnya persentase jumlah koperasi aktif yaitu masih dibawah 70%.
  - g. Masih rendahnya tingkat kepatuhan koperasi terhadap ketentuan yang berlaku sehingga berpengaruh pada pengelolaan koperasi.
  - h. Terbatasnya sarana prasarana penunjang pembina koperasi.

Beberapa upaya telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembinaan koperasi dengan penerapan sistem, prosedur dan tata cara pendirian/pendaftaran koperasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi secara berkesinambungan terhadap koperasi.
- c. Peningkatan kompetensi SDM Koperasi melalui keikutsertaan petugas koperasi pada pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak luar.
- d. Peningkatan kompetensi pembina koperasi

2. Indikator volume usaha UMKM, dengan capaian kinerja sebesar 117,34% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian ini dikarenakan beberapa hal antara lain:
- a. Pemerintah melakukan pembinaan kepada kelompok UMKM.
  - b. Adanya bantuan Pemerintah untuk sarana prasarana pendukung produksi UMKM.
  - c. Berbagai stimulan dan promosi terus digulirkan untuk meningkatkan daya saing UMKM yaitu dengan menggerakkan UMKM melalui bidang pariwisata. Sebab pariwisata memberikan dampak langsung bagi perputaran UMKM, mulai dari kuliner maupun penginapan.
  - d. Menjalinkan kemitraan dan memasarkan produk UMKM ke toko-toko di Kota Singkawang dan sekitarnya.
  - e. Semakin berkembangnya kreatifitas kelompok UMKM dalam mengembangkan daya jual produknya.
  - f. Meningkatkan jiwa kewirausahaan pada kelompok UMKM.

Namun dalam pelaksanaan selalu masih ada permasalahan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan volume UMKM, antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas daya saing produk UMKM dalam menghadapi pasar nasional.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana usaha mikro kecil yang dikelola sehingga perlu peningkatan fasilitas sarana prasarana pengembangan usaha bagi UMKM.
- c. Lemahnya kompetensi pengelola UMKM.
- d. Belum optimalnya manajemen keuangan pada kelompok UMKM.
- e. Belum optimalnya sinergitas antar unit kerja untuk pengembangan UMKM.
- f. Bencana epidemi covid yang mempengaruhi peningkatan volume UMKM.

3. Indikator nilai PDRB sektor industri, secara umum meningkat. Hal ini disebabkan antara lain:
  - a. Pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku IKM berupa sarana dan prasarana produksi baik dalam bentuk mesin peralatan maupun rumah produksi.
  - b. Melakukan pembinaan melalui pelatihan keterampilan dan pemanfaatan teknologi kepada pelaku IKM.
  - c. Berkembangnya kreatifitas pelaku IKM yang berpengaruh pada peningkatan produksi.
  - d. Melakukan promosi melalui event-event berskala lokal maupun nasional .

Permasalahan yang masih dialami dalam pencapaian target :

- a. Masih rendahnya kualitas daya saing produk IKM dalam menghadapi pasar nasional.
  - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana usaha IKM yang dikelola sehingga perlu peningkatan fasilitas sarana prasarana pengembangan usaha bagi pelaku IKM.
  - c. Kurangnya penguasaan teknologi bagi pelaku IKM.
  - d. Belum optimalnya manajemen keuangan pada kelompok IKM.
  - e. Belum optimalnya sinergitas antar unit kerja untuk pengembangan IKM.
  - f. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pelaku IKM dengan pasar modern terkait sistem pemasaran.
4. Indikator cakupan ekonomi kreatif, telah melebihi target sehingga capaiannya sebesar 177,78%.

Ekonomi kreatif merupakan konsep pengembangan ekonomi yang mengadakan daya kreasi untuk menciptakan produk maupun menambah nilai/produk. Saat ini telah berkembang menjadi 16 sub sektor yaitu aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain produk, fashion, desain interior, desain komunikasi visual, seni pertunjukan, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni rupa, televisi dan radio. Saat ini sudah

seluruh sub sektor yang tertangani dari 16 sub sektor yang ada di Kota Singkawang. Keberhasilan ini dikarenakan:

- a. Melaksanakan pembinaan pelaku ekonomi kreatif secara terus menerus untuk mengembangkan konten, kreasi dan teknologi kreatif yang lebih optimal.
- b. Dukungan Pemerintah Pusat terhadap pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Tahun 2018 Pemerintah Pusat melaksanakan program IKKON kepada pelaku EKRAF di Kota Singkawang. Di Tahun 2019 Pemerintah Kota Singkawang terpilih sebagai salah satu penerima program KOPIKON. Program ini berpengaruh terhadap perkembangan pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang.
- c. Telah terbentuknya komunitas ekonomi kreatif di Kota Singkawang yang dilakukan pembinaan oleh dinas terkait.

Masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif, antara lain:

- a. Pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif belum optimal.
- b. Belum sinergisnya pengembangan antara pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku industri pariwisata lainnya.
- c. Belum maksimalnya manajemen perencanaan dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- d. Lemahnya kapabilitas SDM pelaku ekonomi kreatif.

#### 4. Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah

##### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.11  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya Investasi Daerah	1 Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	5,00%	64,19%	1283,8%

Dalam mengukur sasaran meningkatnya investasi daerah melalui indikator persentase pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA. Pada tahun 2020 ini ditargetkan tumbuh sebesar 5%. Penetapan target pada RPJMD

dengan memperhatikan tren pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA 2 (dua) tahun sebelumnya. Namun seiring dengan banyaknya investor yang berinvestasi di Kota Singkawang pada tahun 2020, membuat pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA tersebut mencapai 64,19% yang membuat capaian kinerjanya menjadi 1283,8 %.

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.12  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Investasi Daerah	Peningkatan iklim dan realisasi investasi	162.720.600	141.418.500	86,91	1283	1196,89
<b>Rata-rata</b>				86,91	1283	<b>1196,89</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 86,91 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 1.283%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 1.196,89 %.

### 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran strategis meningkatnya investasi daerah diarahkan pada program-program yang terkait dengan investasi daerah. Adapun program yang mendukung adalah program peningkatan iklim dan realisasi investasi dengan capaian kinerja 1.196,89 %, dengan kegiatan:

- a. Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi capaian 100%.
- b. Penyusunan Data Dan Informasi Penanaman Modal capaian 100%.
- c. Pengelolaan Dan Pemeliharaan Web capaian 100%.
- d. Penyusunan Media Promosi Investasi capaian 100%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.13  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019,2020 dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	43,73	357,35	64,19	98,18

Pada tabel diatas terlihat persentase pertumbuhan nilai realisasi investasi di Kota Singkawang adanya penurunan tahun 2020 dibanding tahun 2019. Hal ini dipengaruhi karena kondisi akibat bencana epidemi covid-19 yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang.

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta permasalahan yang masih dihadapi**

Persentase pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA dengan nilai capaian melebihi target dan sangat tinggi yaitu sebesar 1.196,89 %, dikarenakan:

1. Penetapan target yang terlalu rendah dari unit kerja pengampu, tanpa memperhatikan pertumbuhan nilai realisasi PMDN/PMA tahun sebelumnya.
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang terus dilaksanakan, memberikan peran besar terhadap peningkatan nilai realisasi investasi di Kota Singkawang.
3. Kondisi yang kondusif dibidang keamanan dan ketertiban memberikan pengaruh yang positif bagi investor menanamkan modalnya.
4. Penyempurnaan SOP dalam pelayananan perijinan secara berkala dan terus menerus dan inovasi pelayanan melalui OSS.
5. Keberadaan sumber daya alam yang berpotensi khususnya objek daya tarik wisata yang berpeluang untuk dikembangkan.
6. Komitmen Pemerintah Kota Singkawang terhadap kemudahan pelayanan perijinan.
7. Meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha atau investor.

8. Adanya payung hukum yang memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada dinas penanaman modal dan tenaga kerja.
9. Meningkatnya kepercayaan investor kepada Pemerintah Kota Singkawang.

Namun dalam pencapaian pertumbuhan nilai investasi, masih banyak permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Belum optimalnya payung hukum dalam pengelolaan investasi daerah dan pengelolaan dana CSR.
2. Belum tersedianya rencana umum penanaman modal Kota Singkawang.
3. Pelaksanaan perijinan yang belum sepenuhnya satu pintu, sehingga masih menghambat beberapa pelayanan perijinan yang sangat berpengaruh terhadap investasi.
4. Belum maksimalnya promosi daerah dan pemetaan data terhadap peluang investasi yang pasti bagi para investor.
5. Masih kurangnya SDM untuk pengelolaan pelayanan perijinan dan investasi.

## 5. Sasaran Strategis Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.14  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
5	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	1	Angka tingkat Pengangguran Terbuka	7,45	8,78	84,85
		2	Angka Kemiskinan	5	4,53	110,38
		Rata - rata				

Pada sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan diukur melalui indikator angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Pada tahun 2020, angka tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,78 % dari 7,45% yang ditargetkan sehingga capaian kinerjanya adalah 84,85%. Sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2020 adalah 4,53 %, dari target sebesar 5% sehingga pencapaiannya adalah

110,38 %. Secara rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah 97,62 %.

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.15  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	210.546.000	201.194.250	95,56	97,62	n/a
	Peningkatan Kesempatan Kerja	41.289.525	40.189.525	97,34		
	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	2.067.215.190	1.998.550.429	96,68		
	Pembinaan anak terlantar	12.806.500	12.806.500	100		
	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) & (PMKS) lainnya	50.185.100	50.185.100	100		
	Peningkatan pelayanan publik bidang sosial	97.713.650	91.615.900	93,76		
	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	15.000.000	15.000.000	100		
<b>Rata - rata</b>				<b>97,62</b>	97,62	<b>n/a</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,62 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 97,62 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kerjanya belum mencapai 100%.

### 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 7(tujuh) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kesempatan kerja dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan:
  1. Pembinaan penerapan wajib lapor lowongan kerja diperusahaan capaian 100%.

2. Sosialisasi prosedur penempatan tenaga kerja luar negeri capaian 100%.
- b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan capaian kinerja 100%, dengan kegiatan:
1. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa capaian 100%.
  2. Peningkatan penanganan penyaluran jaminan sosial bagi orang dengan disabilitas berat capaian 100%.
  3. Peningkatan penanganan penyaluran jaminan sosial bagi lanjut usia tidak berdaya capaian 100%.
  4. Verifikasi dan validasi peserta PBI BPJS kesehatan capaian 100%.
  5. Peningkatan sarana dan prasarana luar panti capaian 100%.
  6. Verifikasi dan validasi data kemiskinan capaian 100%.
  7. Pelayanan bagi orang terlantar dan eks pasien rumah sakit jiwa capaian 100%.
  8. Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis di luar panti capaian 100%.
  9. Pengadaan peralatan bantu bagi anak penerima layanan panti rehabilitasi sosial anak diprovinsi dan luar panti dikab/kota.
  10. Pengadaan peralatan bantu bagi lanjut usia penerima layanan panti rehabilitasi sosial lanjut usia di provinsi dan luar panti di kab/kota.
- c. Program pembinaan anak terlantar dengan capaian 100%, melalui kegiatan penanganan diversi anak berhadapan dengan hukum capaian 100%.
- d. Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesehatan sosial (PMKS) lainnya dengan capaian kinerja 100%, kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) jasa capaian 100%.
- e. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial dengan capaian kinerja 100%, kegiatan penyuluhan bagi penyandang penyakit sosial capaian 100%.

- f. Program peningkatan pelayanan publik bidang sosial dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan:
1. Penguatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) capaian 100%.
  2. Peningkatan penanganan program keluarga harapan (PKH) capaian 100%.
- g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan capaian kinerja 100%, kegiatan:
1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat capaian 100%.
  2. Peningkatan penanganan program keluarga harapan (PKH) capaian 100%.

Adapun program/kegiatan yang capaian tidak mencapai 100%, dan menjadi penyumbang kegagalan dalam pencapaian kinerja, yaitu:

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas kerja dengan capaian kinerja 90 %, melalui kegiatan:
1. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja capaian 100%.
  2. Monitoring evaluasi dan pelaporan tenaga kerja capaian 100%.
  3. Penyuluhan dan sosialisasi peraturan pelaksanaan hubungan industrial capaian 100%.
  4. Pembinaan lembaga kerjasama tripartit capaian 25 % .
  5. Perumusan dan penyusunan pengupahan ketenagakerjaan capaian 100%.
  6. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial capaian 50 %.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.16  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019,2020 dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Angka tingkat pengangguran Terbuka	8,19	8,54	8,78	6.85
	Angka Kemiskinan	5,12	4,91	4,53	4,60

Pada tabel diatas tingkat pengangguran terbuka setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah pencari kerja yang terus bertambah setiap tahunnya tetapi belum diikuti dengan kesempatan kerja yang luas. Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja menunjukkan peningkatan setiap tahun. Terjadi peningkatan cukup signifikan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid 19 yaitu sebanyak 9.411 dibanding tahun sebelumnya 8.523 orang. Jumlah penduduk Angkatan kerja juga bertambah cukup banyak pada tahun 2020 yaitu sebanyak 107.152 dibanding tahun 2019 sebanyak 99.821.

Selanjutnya angka kemiskinan di Kota Singkawang trend nya menurun setiap tahun dengan harapan angka kemiskinan dapat terus ditekan meskipun telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD.

### **c. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator tingkat pengangguran terbuka belum mencapai target dan semakin meningkat , hal ini disebabkan :
  - a. Lapangan kerja yang semakin berkurang sebagai akibat langsung pandemi covid 19 yang memberikan dampak sangat besar terhadap tingkat pengangguran.
  - b. Ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikannya.
  - c. Jiwa kewirausahaan yang belum terbentuk untuk menumbuhkan lapangan kerja baru.

Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan terkait lapangan usaha yang mengalami penutupan atau pengurangan tenaga kerja serta pendataan terkait tenaga kerja yang mengalami PHK termasuk yang dirumahkan.
  - b. Memotivasi pencari kerja untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan.
2. Indikator angka kemiskinan melebihi target, dikarenakan :
    - a. Verifikasi dan validasi data yang selalu dilaksanakan secara berkala sehingga data masyarakat miskin selalu terupdate. Hal ini sangat

berpengaruh terhadap efektifitas dan ketepatan sasaran dalam pengentasan kemiskinan.

- b. Sinergisitas pemerintah dengan mitra kerja dalam pengentasan kemiskinan seperti pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.
- c. Semakin meningkatnya tingkat kepedulian sosial pelaku usaha terhadap program pengentasan kemiskinan.
- d. Pemerintah Kota Singkawang memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu.
- e. Semakin kuatnya peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD).
- f. Pemerintah Kota Singkawang berperan aktif dalam rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain anak punk, gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas, lansia terlantar dan orang dengan gangguan jiwa.
- g. Pemerintah Kota Singkawang berperan aktif dalam perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.
- h. Pemerintah aktif dalam pembinaan terhadap kelompok wanita terutama wanita rawan sosial ekonomi.
- i. Peran aktif Pemerintah Pusat dalam pengentasan kemiskinan di daerah melalui program keluarga harapan (PKH), kelompok usaha bersama (KUBE) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
- j. Tersedianya pusat pelayanan dan pengaduan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu.

Meskipun pencapaian target telah melampaui, masih terdapat permasalahan yang ditemui antara lain :

- a. Belum optimalnya sinergisitas program pengentasan kemiskinan antar instansi.
- b. Masih belum optimalnya peran TKPKD dalam sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan.
- c. Masih besarnya potensi kemiskinan intergeneratif.
- d. Masih lemahnya aksesibilitas informasi program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu.

- e. Kurangnya inisiatif dan motivasi kelompok masyarakat miskin dalam upaya peningkatan kesejahteraannya.
- f. Masih terdapat kewenangan yang belum dilimpahkan secara penuh kepada Pemerintah Daerah dalam penanganan kemiskinan.

## 6. Sasaran Strategis Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.17  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian Daerah	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian	3,50	0,47	13,42
		2	Nilai PDRB Sektor Perikanan	1,98	-0,10	- 5,05
Rata - rata						4,18

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian dan perikanan diukur melalui 2 (dua) indikator. Indikator pertama yaitu nilai PDRB sektor pertanian dengan realisasi sebesar 0,47 dari target 3,50, sehingga capaiannya sangat kecil sebesar 13,42% dan tidak mencapai target.

Indikator kedua yaitu nilai PDRB sektor perikanan, realisasi akhir tahun mencapai - 0,10 dari target 1,98. Sehingga capaian kinerja mencapai -5,05. Dari keseluruhan indikator pada sasaran meningkatnya produksi pertanian dan perikanan secara rata-rata capaiannya adalah 4,18

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.18  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Peningkatan Kesejahteraan Petani	3.015.000	3.015.000	100	4,18	
		Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	61.630.000	61.630.000	100		

Daerah		Peningkatan produksi pertanian /perkebunan	2.809.721.500	2.796.228.000	99,51		
		Pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan	120.074.100	120.073.100	100		
		Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	857.952.490	842.584.621	98,20		
		Peningkatan produksi hasil peternakan	212.375.000	208.611.000	98,22		
		Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	92.700.000	91.165.080	98,34		
	Nilai PDRB Sektor Perikanan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	930.000	930.000	100		
		Pengembangan budidaya perikanan	1.068.370.750	1.051.976.400	98,47		
		Pengembangan perikanan tangkap	2.284.570.350	2.271.051.470	99,41		
		Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	294.642.150	274.143.000	93,04		
		Rata-Rata			98,65		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,65% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 4,18%, maka tidak dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja.

## 2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 11(sebelas) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu:

- a. Program peningkatan kesejahteraan petani dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan kegiatan Pelatihan petani dan pelaku bisnis capaian 100%.
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan Promosi

- atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah capaian 100%.
- c. Program peningkatan produksi pertanian /perkebunandengan capaiankinerja 100%, melalui kegiatan:
    - 1. Penyediaan sarana produksi pertanian, capaian 100%.
    - 2. Penunjang penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, capaian 100%.
    - 3. Penyediaan sarana produksi perkebunan, capaian 100%.
    - 4. Penyediaan sarana prasarana pertanian, capaian 100%
  - d. Program pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangandengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan:
    - 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, capaian 100%.
    - 2. Pengelolaan balai penyuluh kecamatan, capaian 100%.
  - e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternakdengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan:
    - 1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, capaian 100%.
    - 2. Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, capaian 100%.
    - 3. Peningkatan kapasitas rumah potong hewan, capaian 100%.
    - 4. Peningkatan kapasitas pusat kesehatan hewan terpadu, capaian 100%.
    - 5. Penanggulangan penyakit zoonosis, capaiannya 100%.
  - f. Program peningkatan produksi hasil peternakancapaiankinerja 100%, melalui kegiatan pembibitan dan perawatan ternak dengan capaian 100%.
  - g. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakandengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan Peningkatan pengolahan pangan asal hewan dan produk hewan non pangan dengan capaian 100%.
  - h. Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan pengembangan SDM kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dengan capaian 100%.

- i. Program pengembangan budidaya perikanan dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan :
  - 1. Peningkatan balai benih ikan, capaian 100%.
  - 2. Penyediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan, capaian 100%.
  - 3. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan, capaian 100%.
- j. Program pengembangan perikanan tangkap dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, capaian 100%.
- k. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan capaian kinerja 100%, melalui kegiatan :
  - 1. Sarana dan prasarana pengolahan hasil, capaian 100%.
  - 2. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran, capaian 100%.
  - 3. Operasional rumah kemasan, capaian 100%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.19  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian Daerah	Nilai PDRB Sektor Pertanian	2,71	3,97	0,47	4,60
	Nilai PDRB Sektor Perikanan	2,13	2,42	-0,10	2,16

Nilai PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan angka yang terus meningkat namun pada tahun 2020 Nilai PDRB sektor Pertanian mengalami penurunan. Sedangkan nilai PDRB Sektor Perikanan pada tahun 2020 mengalami penurunan, melihat dari capaian kinerja 2 (dua) sektor tersebut, maka pemerintah berkomitmen untuk dapat meningkatkan sector tersebut dan mencapai target yang telah ditentukan dalam RPJMD.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator nilai PDRB sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh

- ) Produksi dan produktivitas tanaman pangan
- ) Produksi dan produktivitas hortikultura
- ) Produksi dan produktivitas perkebunan
- ) Produksi dan produktivitas peternakan
- ) Jasa pertanian

Indikator nilai PDRB tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh:

- ) Berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat dari banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau non pertanian lainnya.
- ) Masih kurangnya kesadaran terhadap penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan
- ) Minimnya jumlah pupuk bersubsidi.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut:

- ) Penegakan terhadap regulasi terhadap penggunaan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi lahan.
- ) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengaruh penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan.
- ) Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap program *cutting hatching egg*.
- ) Mengoptimalkan pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- ) Meningkatkan sarana produksi pertanian.

2. Untuk PDRB sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh

- ) Produksi perikanan tangkap
- ) Produksi perikanan budidaya
- ) Produksi pengolahan

Indikator nilai PDRB sektor perikanan belum mencapai target, dikarenakan:

- ) Belum optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumberdaya alam (SDA) perikanan.

- ) Masih kurangnya pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan.
- ) Minimnya bahan baku untuk pengolahan, dikarenakan masih mengandalkan produksi ikan yang bersifat musiman.
- ) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani urusan perikanan.
- ) Belum semua pelaku usaha perikanan bergabung didalam kelompok /koperasi perikanan.

Upaya yang dilaksanakan untuk dalam pemecahan dalam mengantisipasi masalah yang ada:

- ) Mendorong peran serta pihak pengusaha, nelayan dan pembudidaya ikan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktifitas, terutama dalam bantuan peralatan dan permodalan serta management pengelolaan usaha.
- ) Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya ikan agar mau dan mampu menerima serta menerapkan inovasi dan teknologi tepat guna yang menguntungkan.
- ) Pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan.
- ) Mengembangkan sistem perekonomian masyarakat melalui pengembangan koperasi perikanan.
- ) Mengupayakan usaha perikanan alternatif bagi nelayan tangkap pada musim paceklik.
- ) Menjalin komitmen dengan pengusaha atau swasta dalam pembinaan dan peningkatan penghasilan pelaku usaha perikanan.

## 7. Sasaran Strategis Meningkatnya ketahanan pangan dan daerah

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.20  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
7	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Daerah	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82	82,89	101,09

\*Proyeksi 2019 aktual PPH Konsumsi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Pada indikator sasaran strategis ini, terdapat 1 (satu) indikator yaitu skor pola pangan harapan yang pada tahun 2020 ini, ditargetkan sebesar 82%. Akhir tahun 2020 terealisasi sebesar 82,89%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,09%.

### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.21  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Daerah	Peningkatan Ketahanan pangan pertanian dan perkebunan	62.824.000	60.772.500	96,73	101,09	4,36

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 96,03% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,09%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya dapat dikategorikan pencapaian tingkat efisien hanya sebesar 4,36%.

### 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran ini dilaksanakan melalui program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan dengan capaian 100% yang dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, capaian 100%.
- b. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), capaian 100%.

### b. Perbandingan antara realisasi kinerja selama 3 tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.22  
Perbandingan realisasi kinerja 2018, 2019, 2020 dan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	82,1	84,3	82,89	90

Skor pola pangan harapan pada tahun 2020 mengalami penurunan capaian dari tahun 2019. Pemerintah daerah kedepannya berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD.

### **c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Skor pola pangan harapan sangat dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Indikator ini mencapai target.

- ❖ Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target, adalah :
  1. Penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan kepada masyarakat.
  2. Melakukan pembinaan secara rutin kepada masyarakat agar memanfaatkan pekarangan untuk menanam sebagai sumber pangan dan gizi.
  3. Memberikan bantuan secara stimulan kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dalam bentuk bibit.
  4. Peran serta dari Pemerintah Pusat dalam meningkatkan ketahanan pangan.
  5. Pendampingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat.
  
- ❖ Hambatan/Permasalahan yang masih dirasakan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah:
  1. Lemahnya kesadaran pada kelompok masyarakat tertentu tentang pola konsumsi pangan.
  2. Masih ada kelompok masyarakat yang kurang menyadari dalam memanfaatkan lahan pekarangan.
  3. Kurang optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal.
  
- ❖ Solusi  
Untuk mencapai target akhir RPJMD 2022, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan akan terus melakukan peningkatan capaian kinerja pada

indikator sasaran strategis ini. Oleh karena itu, beberapa upaya solutif yang akan dilakukan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya diversifikasi konsumsi pangan.
2. Peningkatan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan lokal.

## 8. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.23  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
8	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	80,6	80	99,26
		2	Indeks Kualitas Udara	85,6	85,85	100,29
		3	Indeks Tutupan Lahan	31,75	30,21	95,15
Rata –rata					98,23	

Dalam mencapai sasaran strategis ke-8(delapan) yaitu meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan yang diukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator pertama adalah indeks kualitas air dengan target 80,6%. Pada akhir tahun 2020 indeks kualitas air terealisasi sebesar 80%, sehingga capaian kinerja sebesar 99,26%, artinya bahwa target yang telah ditetapkan tercapai.

Indikator kedua yaitu indeks kualitas udara yang realisasinya tahun 2020 sebesar 85,85 dari target 85,6, sehingga capaian kinerja sebesar 100,29, artinya bahwa target yang telah ditetapkan tercapai.

Indikator ketiga yaitu indeks tutupan lahan dengan target 31,75 pada tahun 2020 realisasinya adalah 30,21 dengan capaian sebesar 95,15%, artinya pencapaian indikator ketiga sasaran ini hampir mencapai target.

Dari keseluruhan indikator pada sasaran meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan secara rata-rata capaiannya adalah 98,23%.

## 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.24  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	10.733.092	10.581.542	98,59	98,12	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,59% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 98,12 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum adanya efisiensi anggaran.

## 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang mengusung pencapaian sasaran ini yaitu program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan capaian 100%, melalui kegiatan:

1. Pemantauan kualitas lingkungan capaian 100%
2. Pengukuran indeks tutupan lahan capaian 100%

## b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.25  
Perbandingan realisasi kinerja 2018, 2019, 2020 dan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	52,11	83,33	80	86
	Indeks Kualitas Udara	83,53	88,89	85,85	86,00
	Indeks Tutupan Lahan	24,28	26,62	30,21	49,39

Indeks kualitas air pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2018.

Indeks kualitas udara menunjukkan penurunan dari tahun 2019. Sementara indeks tutupan lahan menunjukkan angka yang semakin meningkat namun menunjukkan bahwa indeks tutupan lahan semakin berkurang.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indeks kualitas air

Indeks kualitas air tahun 2020 sebesar 80% menunjukkan masih pada kategori cemar ringan. Capaian indikator belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- b. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan limbah domestik rumah tangga.

Upaya yang dilakukan, antara lain :

- a. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- b. Memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan melalui media sosial, spanduk dan billboard.
- c. Penguatan kelembagaan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan pencemaran lingkungan pada sumber daya air.
- d. Peningkatan kapasitas UPT pengelola sampah dalam rencana aksi dalam bersih lingkungan.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara diukur pada 4 titik pantau yaitu pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi dalam kondisi normal/ambien. Indeks kualitas udara tahun 2020 sebesar 85,56. Ini menunjukkan kategori sangat baik.

Indeks kualitas udara mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

- a. Kota Singkawang bukan termasuk dalam kategori Kota Metropolitan atau Kota Industri, sehingga kualitas udara masih baik.
- b. Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- c. Sumber emisi bergerak dan tidak bergerak masih relatif kecil.
- d. Kebijakan pemanfaatan ruang di Kota Singkawang masih mengacu pada dokumen RTRW yang ada, sehingga berpengaruh terhadap polusi udara.
- e. Kota Singkawang memiliki cagar alam raya pasi sebagai kontributor penghasil oksigen terbesar.
- f. Beberapa perusahaan penghasil emisi (PLTD Sei Wie dan Sudirman) hanya beroperasi pada waktu waktu tertentu sebagai cadangan.
- g. Berkurangnya aktifitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat penanganan sampah di Kota Singkawang yang lebih baik.

Meskipun demikian, dalam pencapaian indeks kualitas udara masih menemui permasalahan yaitu Pemerintah Kota Singkawang belum mempunyai sarana dan prasarana untuk melakukan pengujian sampel udara. Sehingga untuk pengujian sampel udara hanya dapat dilaksanakan 1 kali tergantung jadwal dari Pemerintah Pusat.

3. Indeks Tutupan Lahan tahun 2020 sebesar 30,21 yang masuk dalam kategori waspada. Capaian ini masih belum mencapai target yang disebabkan oleh :
  - a. Alih fungsi lahan yang digunakan untuk wilayah permukiman, pertambangan dan peternakan.
  - b. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
  - c. Penebangan liar.
  - d. Kerusakan kawasan pesisir akibat dari abrasi pantai.

Untuk mengatasi hambatan tersebut diatas dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan program penghijauan.
- b. Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- c. Membentuk kelompok masyarakat peduli api untuk ikut serta dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- d. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan .
- e. Rehabilitasi wilayah pesisir.
- f. Pemulihan lahan bekas tambang.

## 9. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.26  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	83,74	93
		2	Nilai LPPD	ST	n/a	n/a
		3	Indeks SPBE	2 (cukup)	3,82	191
Rata-rata					142	

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat 3 (tiga) indikator. Indikator pertama yaitu indeks kepuasan masyarakat yang ditargetkan 90 pada tahun 2020 dengan realisasi akhir sebesar 83,74 dengan capaian sebesar 93%.

Indikator kedua yaitu nilai LPPD dengan target Sangat Tinggi, pada tahun 2020 nilai LPPD belum bisa disajikan karena sampai saat ini belum dikeluarkan hasil penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri.

Indikator ketiga yaitu Indeks SPBE dengan target nilai 2 (cukup), pada Tahun 2020 berhasil melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 3,82 dengan capaian 191%.

## 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.27  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengembangan Kinerja Organisasi	29.287.400	27.469.200	93,79	142	
	Peningkatan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	107.245.500	81.532.583	76,02		
	Optimalisasi sistem informasi E-Government	4.268.637.685	4.038.933.131	94,6		
	Peningkatan dan pengembangan persandian	43.021.800	22.721.800	52,81		
	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	169.430.700	162.580.700	95,96		
	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	62.178.000	57.167.800	91,94		
	Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	0	0	0		
	kerjasama informasi dan media massa	652.793.900	600.593.000	92		
	<b>Rata-rata</b>			<b>85,30</b>		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85,30 dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 142%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 56,7.

## 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung oleh:

1. Program peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan

kegiatan Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Singkawang yang diampu oleh Bagian Pemerintahan.

2. Terdapat 4 (empat) program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks SPBE, yaitu :
  - a. Optimalisasi sistem informasi E-Government dengan capaian kinerja 100 melalui kegiatan;
    1. Pemeliharaan dan pengembangan website capaian 100%.
    2. Pembangunan jaringan CCTV capaian 100%.
    3. Pembangunan jaringan telekomunikasi capaian 100%.
    4. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic capaian 100%.
    5. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kab/kota capaian 100%
    6. Pengelolaan control room capaian 100%.
  - b. Peningkatan dan pengembangan persandian dengan capaian kinerja 100 melalui kegiatan Optimalisasi fungsi persandian dan pengamanan informasi dan jaringan komunikasi, capaian 100%.
  - c. Pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan capaian kinerja 100 melalui kegiatan pengolahan, updating dan analisi data data dan statistik daerah capaian 100%;
  - d. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan capaian kinerja 100 melalui kegiatan :
    1. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi, capaian 100%.
    2. Pengelolaan konten dan perencanaan dan perencanaan media komunikasi publik.
  - e. kerjasama informasi dan media massa dengan capaian kinerja 100 melalui kegiatan :
    1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah capaian 100%;
    2. Pengelolaan media komunikasi publik capaian 100%.

Adapun program/kegiatan yang capaian tidak memenuhi capaian bahkan tidak terlaksana dan menjadi penyumbang kegagalan dalam pencapaian kinerja, yaitu:

1. Program pengembangan kinerja organisasi melalui kegiatan survey kepuasan masyarakat yang diampu oleh Bagian Organisasi sebagai koordinator dalam penilaian pelayanan publik, dengan capaian 83,74 %.
2. program fasilitas peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informatika dengan capaian 0%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.28  
Perbandingan realisasi kinerja 2018, 2019, 2020 dan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,57	82,52	83,74	95
	Nilai LPPD	T	ST	n/a	Sangat Tinggi
	Indeks SPBE	1,74	1,8	3,82	2

1. Nilai indeks kepuasan masyarakat setiap tahunnya meningkat walaupun belum mencapai target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD.
2. Nilai LPPD pada tahun 2020 belum dapat diketahui karena belum dikeluarkannya hasil evaluasi penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri.
3. Nilai Indeks SPBE pada Tahun 2020 ditargetkan dengan nilai 2 (dua), melihat realisasi kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 indeks SPBE mengalami peningkatan nilai dari target yang telah ditetapkan, dan pada Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang melakukan penilaian mandiri dengan hasil indeks sebesar 3,82 yang artinya realisasi indeks melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 191%.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator nilai indeks kepuasan masyarakat belum mencapai target hanya mencapai 83,74. terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja indikator ini adalah :
  - a. Tidak teranggarkan untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat maka belum menjadi prioritas utama oleh perangkat daerah sehingga adanya keterlambatan untuk menindaklanjuti hasil survey yang telah dilakukan.
  - b. Keterlambatan menindaklanjuti SKM disebabkan karena keterbatasan SDM sehingga penyampaian laporan melewati batas yang telah ditetapkan.
  - c. Belum adanya pemahaman yang sama bagi Perangkat daerah terkait peran dan fungsi survey kepuasan masyarakat.
  - d. Lemahnya komitmen Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan tindak lanjut survey kepuasan masyarakat.Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
  - a. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada TAPD dari hasil evaluasi hasil IKM untuk dapat dianggarkan dan menjadi target kinerja pada perangkat daerah.
2. Indikator nilai LPPD, sampai saat ini belum dikeluarkan hasil evaluasi penilaian LPPD oleh KEMENDAGRI, namun tetap terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja indikator ini adalah:
  - a. Adanya perubahan indikator dalam penilaian berdasarkan kategori yaitu pemerintah daerah maju, sedang dan terbelakang. Pemerintah Kota Singkawang masuk kategori sedang.
  - b. Masih adanya perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data
  - c. Beberapa data dukung Indikator Kinerja Kunci yang disampaikan berubah-ubah dari perangkat daerah.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Melakukan koordinasi terkait pengisian data LPPD dengan seluruh perangkat daerah.
  - b. Melaksanakan sosialisasi pengisian data kepada petugas pengelola LPPD pada perangkat daerah.
3. Indikator Indeks SPBE pada tahun 2020 dapat mencapai target dengan nilai baik berdasarkan hasil penilaian mandiri, hal ini disebabkan karena:
- a. telah terpenuhinya sebagian besar dari 31 indikator dalam penilaian SPBE;
  - b. kebijakan terkait SPBE telah dapat dipenuhi sebagai landasan dalam pelaksanaan SPBE;
  - c. Infrastruktur semakin menyebar luas keseluruh Perangkat Daerah;
  - d. Keadaan bennwich mencukupi untuk mensuplai keseluruh Perangkat Daerah;
  - e. Aplikasi yang telah diterapkan semakin bertambah;
  - f. Network operation center (NOC) semakin tinggi;
  - g. Kapasitas penyimpanan arsip telah semakin baik dan telah berpindah ke Indonesia, dengan penyimpanan sebelumnya di Singapura.
  - h. terbangunnya *Telematic Control Management (TCM) Room*.

Meskipun dalam pencapaian target telah memenuhi capaian, namun masih terjadi permasalahan dalam pelaksanaan SPBE, antara lain:

- a. Keterbatasan SDM pengelola TIK disetiap Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah pengampu yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi Publik; dan
- b. Komitmen yang masih lemah pada tingkat pimpinan terkait pelaksanaan SPBE.

## 10. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.29  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Nilai SAKIP	BB	n/a	-
		2 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	n/a	-

Dalam sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang diukur melalui indikator kinerja utama Nilai SAKIP dan Opini BPK terhadap laporan keuangan. Pada tahun 2020 indikator nilai SAKIP dengan target BB belum dapat diketahui karena belum dikeluarkannya hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Selanjutnya untuk opini BPK terhadap laporan keuangan belum bisa disajikan karena masih dalam proses pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.30  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI I
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	53.147.950	46.931.250	88,30	n/a	n/a
	Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.390.644.572	1.983.051.098	82,95		
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.898.896.750	1.752.225.600	92,27		
Rata-rata				80,90	n/a	n/a

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 80,90 % dan capaian kinerja, belum dapat dilihat adanya efisiensi.

## **2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan didukung oleh program/kegiatan yang capaian kerjanya telah 100%, yaitu: daerah, melalui kegiatan :

- a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, melalui kegiatan :
  1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
  2. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.
  3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
  4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.
  5. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD.
  6. FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
  7. Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana.
  8. Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
  9. Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD.
  10. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  11. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  12. Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang
  13. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
  14. Distribusi Barang Milik Daerah .
  15. Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya.
  16. Pengamanan Barang Milik Daerah.

17. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
  18. Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan.
  19. Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  20. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
  21. Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  22. Penilaian Barang Milik Daerah.
  23. Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD.
  24. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer.
  25. Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga.
  26. Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  27. Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang.
  28. Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD.
  29. Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
  30. Pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan PPKD.
- b. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan :
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB.
  2. Penerbitan izin pemasangan reklame.
  3. Rapat koordinasi PAD.
  4. Pekan panutan PBB.
  5. Pelayanan penerimaan pajak daerah.
  6. Intensifikasi sumber-sumber penerimaan dan pendataan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah.
  7. Penerbitan penerimaan pajak daerah.
  8. Pencetakan massal SPPT dan DHKP PBB-P2.
  9. Pemeriksaan wajib pajak daerah.
  10. Sistem monitoring online data transaksi wajib pajak daerah.
  11. Intensifikasi dan ekstensifikasi BPHTB.

12. Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
13. Pemutakhiran data piutang PBB-P2.
14. FGD pengelolaan PAD.
15. Penyusunan dan revisi produk hukum PAD.
16. Gebyar pajak daerah.
17. Penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang pajak daerah Non PBB-BPHTB.
18. Penerapan sistem pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online.

Adapun program kegiatan yang kurang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah Program peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui kegiatan Penyusunan LAKIP/LKT Pemerintah Kota Singkawang.

#### **b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.31  
Perbandingan realisasi kinerja 2018, 2019 dan 2020 dan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	B	n/a	BB
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	n/a	WTP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020 belum dapat diketahui karena hasil evaluasi belum dikeluarkan oleh KEMENPANRB, namun harapan nilai dan predikat LAKIP Kota Singkawang terus meningkat sampai kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mendapatkan predikat BB sebagaimana target dalam RPJMD.

Secara berturut-turut dalam 2 (dua) tahun terakhir opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Singkawang berhasil diperoleh. Untuk tahun 2020, Pemerintah Kota

Singkawang berupaya terus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Kedepan diharapkan untuk memperhatikan keberhasilan ini dengan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator Nilai SAKIP Pemerintah Kota tahun 2020 telah ada peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya yaitu predikat baik, meskipun belum mencapai target. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas dokumen perencanaan belum berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan pada masyarakat.
- b. Penyajian analisis laporan kinerja belum tersaji secara maksimal sehingga belum dapat mendorong perbaikan perencanaan kedepan.
- c. Sistem pemantauan kinerja belum dilaksanakan secara optimal karena informasi kinerja yang dihasilkan belum efektif untuk perbaikan yang diperlukan.
- d. Evaluasi atas program/kegiatan perlu ditingkatkan dengan memfokuskan kepada hasil (outcome), sehingga dapat meningkatkan capaian hasil program prioritas pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.
- e. Kurang maksimalnya pelaksanaan koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan pelaporan keuangan serta penyelesaiannya permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
- f. Masih lemahnya kompetensi pengelola LAKIP pada tiap perangkat daerah.
- g. Masih belum maksimalnya komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas kinerja.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Penguatan terhadap tim SAKIP dengan melaksanakan koordinasi serta evaluasi terhadap langkah-langkah dalam perbaikan SAKIP Kota Singkawang.

- b. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Kemenpan dan RB serta Provinsi.
  - c. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM pengelola SAKIP melalui pendampingan terhadap pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang.
  - d. Berkoordinasi aktif dengan seluruh perangkat daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - e. Menindaklanjuti hasil rekomendasi Kemenpan dan RB. Terutama perbaikan beberapa komponen yang sangat berpengaruh. Perbaikan dokumen perencanaan menjadi komponen pengungkit dalam evaluasi SAKIP dan menjadi dokumen dalam materi revisi RPJMD
  - f. Penguatan komitmen dan integritas para pimpinan, pengelola dan para pelaksana kegiatan.
2. Indikator opini BPK terhadap laporan keuangan belum dapat disajikan mengingat masih dalam proses pemeriksaan. Memperhatikan trend selama 2 tahun terakhir Pemerintah Kota Singkawang telah memperoleh opini WTP, hal ini disebabkan karena :
- a. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap penerimaan, belanja dan aset.
  - b. Melaksanakan FGD terkait penatusahaan keuangan.
  - c. Adanya regulasi terhadap kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi.
  - d. Melaksanakan koordinasi secara rutin kepada seluruh perangkat daerah terkait permasalahan aset yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan melalui penertiban aset.
  - e. Adanya himbauan tentang pengamanan barang milik daerah.
  - f. Menyiapkan regulasi terkait pengamanan dan pemusnahan barang milik daerah.
  - g. Semakin disiplinnya perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu.
  - h. Sinergisitas unit kerja pengampu pengelola keuangan dan pengawasan terhadap laporan keuangan.

- i. Pemerintah berkomitmen untuk selalu menyelesaikan temuan yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan.
- j. Pemerintah telah menggunakan aplikasi dalam pengelolaan keuangan terkait penerimaan dan pengeluaran.

Meskipun Pemerintah Kota Singkawang telah mendapatkan opini WTP laporan keuangan, tentu selalu ada masalah yang harus selalu diperhatikan dalam pencapaian kinerja indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat keterlambatan dalam penetapan pendapatan yang berpengaruh dalam pelaporan keuangan.
- b. Belum optimalnya aplikasi dalam pengelolaan pendapatan khususnya dalam pengelolaan piutang.
- c. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum memiliki SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset.
- d. Masih terdapat penguasaan aset oleh pihak ketiga yang belum dapat diselesaikan.
- e. Masih terdapat aset tanah milik daerah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Singkawang.
- f. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang terlambat dalam penyampaian SPJ fungsional dan laporan keuangan.

## 11. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.32  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
11	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal	1 Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100

Pada tahun 2020 maturitas SPIP mencapai target yaitu level 3. Maturitas SPIP level 3 merupakan target dari sasaran strategis meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal.

## 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.33  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah	1.599.315.170	1.400.952.945	87,60	100	10,16
	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	87.743.800	72.656.200	82,80		
	Pengawasan reformasi birokrasi	47.674.700	47.312.200	99,23		
	Penegakan integritas	86.770.400	83.974.700	96,77		
<b>Rata - rata</b>				<b>91,6</b>	<b>100</b>	<b>8,4</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,6% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pelaksanaannya adalah 8,4%.

## 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategismeningkatnya kualitas sistem pengawasan internal didukung melalui program yang capaiannya memenuhi 100% yaitu sebagai berikut:

1. Program pengawasan reformasi birokrasi dengan capaian 100%, melalui kegiatan monitoring evaluasi reformasi birokrasi.
2. Program peningkatan integritas dengan capaian 100%, melalui kegiatan :
  - a. Verifikasi LHKASN;
  - b. Monitoring dan evaluasi laporan gratifikasi;
  - c. Reviu laporan RAD PPK; dan
  - d. Penilaian internal zona integritas.

Adapun program yang pencapaiannya belum 100% , namun mendukung pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan dengan capaian 92%, melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
  - b. Investarisasi temuan pengawasan;
  - c. Monitoring evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - d. Pemeriksaan kinerja;
  - e. Reviu RPJMD dan RKPD;
  - f. Reviu RKA;
  - g. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
  - h. Penyelesaian kerugian negara/Rapat TPKD;
  - i. Reviu penyerapan anggaran dan PBJ;
  - j. Reviu LKPD;
  - k. Reviu LAKIP;
  - l. Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah;
  - m. Evaluasi SPIP;
  - n. Reviu DAK;
  - o. Sosialisasi Pencegahan Korupsi;
  - p. Sosialisasi SPIP; dan
  - q. Pemeriksaan Khusus.
2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan capaian 92 %, melalui kegiatan :
    - a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
    - b. Pelatihan dikantor sendiri; dan
    - c. Penilaian angka kredit JFA.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.34  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal	Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

Indikator kinerja Maturitas SPIP pada Tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD yaitu Level 3. Maturitas

SPIP level 3 ini akan terus dipertahankan dan berupaya terus meningkat untuk mewujudkan sistem pengawasan internal yang berkualitas.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Indikator maturitas SPIP telah memenuhi pencapaian target 100% hal ini sangat dipengaruhi oleh :

1. Menyusun prioritas kegiatan kegiatan pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tetap dilakukan secara berkala dimasa pandemi covid-19 dengan membangun komunikasi intens dalam penyampaian bahan tindak lanjut serta melakukan pendekatan personal dengan perangkat daerah yang terdapat kerugian materil maupun aset.
3. Adanya komitmen yang tinggi dari perangkat daerah dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.
4. Adanya komitmen Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah dalam pengendalian intern, salah satunya dengan mengimplementasikan sebagai strategi dalam pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan Opini WTP.
5. Tingginya harapan stakeholder termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih KKN.
6. Komitmen seluruh ASN untuk meningkatkan kapabilitas APIP.
7. Mempertahankan kualitas pengawasan di masa pandemi covid-19 dengan tetap mengedepankan pendampingan dan pembinaan terhadap perangkat daerah melalui media komunikasi, pertemuan terbatas jika dianggap urgent.
8. Reviu dokumen perencanaan secara berkala melalui sisteme-Sakip.
9. Evaluasi terhadap maturitas SPIP pada perangkat daerah yang dilakukan secara berkala.

10. Pendampingan kepada perangkat Daerah yang beresiko/menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti probity audit, klinik konsultasi baik Dana BOS maupun PBJ.
11. Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP Level 3.
12. Proaktif dalam mencari diklat kompetensi yang dilaksanakan secara daring/online.
13. Mengaktifkan pelatihan di kantor sendiri dengan narasumber dari para aparatur pemeriksa yang telah mengikuti diklat dan bimbingan teknis terkait materi pengawasan.
14. Menyediakan aplikasi WBS terkait pengaduan sebagai bentuk pengendalian terhadap risiko yang mungkin muncul.

Meskipun telah mencapai target masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan pandemi covid-19, mengakibatkan sebagian besar kegiatan pengawasan khususnya pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan, sehingga sistem pengendalian intern kurang optimal.
- b. Adanya refocusing anggaran dalam mengatasi pandemi covid-19, dengan dihapusnya beberapa kegiatan pengawasan dalam menunjang pencapaian indikator sasaran strategis.
- c. Tindaklanjut yang melibatkan pihak ketiga, khususnya berkaitan dengan kerugian baik materil maupun asset dalam kewajiban setornya masih lambat dalam perkembangannya.
- d. Diklat kompetensi bagi tenaga aparatur pemeriksa diusulkan setiap tahunnya, akan tetapi berhubung masa pandemic covid-19 tidak ada lagi panggilan terkait diklat kompetensi yang dilakukan secara tatap muka sehingga diklat hanya dilakukan secara daring/online.

## 12. Sasaran Strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.35  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
12	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup	71,89	72,06	100,24

Pada sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur melalui indikator angka usia harapan hidup, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 71,89 dan sesuai data yang dirilis oleh BPS untuk angka usia harapan hidup tahun 2020realisasinya sebesar72,06 sehingga capaiannya adalah 100,24.

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.36  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.045.884.850	5.515.006.652	91,22	100,24	
	Upaya Kesehatan Masyarakat	11.420.451.700	7.381.165.398	64,63		
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	141.916.350	132.499.650	93,36		
	Perbaikan Gizi Masyarakat	140.067.600	126.286.500	90,16		
	Pengembangan Lingkungan Sehat	63.399.500	51.941.200	81,93		
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	934.373.350	621.978.900	66,57		
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.272.800.000	894.955.125	70,31		
	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	3.008.194.700	2.668.215.316	88,70		
	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	20.035.601.550	17.486.855.764	87,28		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	19.374.550	19.142.100	98,80		
	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	58.415.800	56.464.100	96,66		
	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang	56.291.000	33.177.500	58,94		

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
	Kesehatan					
	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Kesehatan	476.857.000	394.115.001	82,65		
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	192.709.500	178.757.992	92,76		
	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Pangan	175.363.900	170.515.500	97,24		
	Program Keluarga Berencana	1.940.141.000	1.689.340.639	87,07		
	Program Pengendalian Penduduk	30.000.000	29.137.339	97,12		
<b>Rata-rata</b>				<b>85,02</b>	<b>100,24</b>	<b>15,22</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85,02% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,24%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi mencapai 15,22%.

## **2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Terdapat 17 (tujuh belas) program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian pernyataan kinerja dalam sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Semua program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan agar keberhasilan dalam upaya menaikkan angka usia harapan hidup.

Program yang capaian kerjanya 100% antara lain:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan capaian 100% melalui kegiatan :
  - a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, capaian 100%;
  - b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, capaian 100%;
  - c. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, capaian 100%; dan
  - d. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, capaian 100%.

2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat capaian 100% melalui kegiatan:
  - a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, capaian 100%;
  - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, capaian 100%; dan
  - c. Peningkatan peran serta masyarakat pada pelayanan kesehatan terpadu (Posyandu), capaian 100%.
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat capaian 100% melalui kegiatan penanggulangan kurang energy protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
4. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan capaian 100% melalui kegiatan :
  - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, capaian 100%;
  - e. Pelayanan kesehatan dasar jaminan kesehatan nasional (Non Kapitasi), capaian 100%;
  - f. Penyelenggaraan bantuan operasinal kesehatan, capaian 100%; dan
  - g. Penyelenggaraan jaminan persalinan, capaian 100%.
5. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak capaian 100% melalui kegiatan Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
6. Program peningkatan pelayanan pelayanan publik bidang kesehatan, capaian 100% melalui kegiatan :
  - a. Peningkatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan, capaian 100%;
  - b. Peningkatan pelayanan perizinan fasilitas kesehatan, capaian 100%; dan
  - c. Peningkatan pelayanan perizinan/rekomendasi bidang kesehatan lainnya, capaian 100%.
7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, capaian 100% melalui kegiatan :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, capaian 100%; dan
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas, capaian 100%.
8. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan pangan capaian 100%. Melalui kegiatan :
- a. Peningkatan pemberdayaan konsumen masyarakat di bidang obat dan makanan, capaian 100%;
  - b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, capaian 100%;
  - c. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga, capaian 100%; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan, capaian 100%.
9. Program Pengendalian Penduduk capaian 100% melalui kegiatan pengolahan data dan informasi kependudukan.

Program kegiatan yang capaiannya tidak sampai 100% yaitu:

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat capaian 78,57% melalui kegiatan :
  - a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, capaian 100%;
  - b. Sekrining kesehatan reproduksi, capaian 50%;
  - c. Penyediaan pelayanan kesehatan pada tempat-tempat terhadap puskesmas 50%;
  - d. Pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin, capaian 100%;
  - e. Penyelenggaraan kesehatan olahraga, capaian 100%; dan
  - f. Pelayanan kesehatan kerja, capaian 50%.
2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat capaian 66,670% melalui kegiatan :
  - a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, capaian 50;
  - b. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat, capaian 50%; dan
  - c. Sosialisasi sanitasi berbasis masyarakat, capaian 100%.

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menularcapaian 91,67% melalui kegiatan :
  - a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, capaian 100%;
  - b. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, capaian 100%;
  - c. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, capaian 75%,
  - d. Peningkatan surveillence epideminologi dan penanggulangan wabah, capaian 50%;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan vaksinasi dan pemeriksaan bagi Jemaah haji; dan
  - f. Pelayanan vaksinasi bagi wanita usia subur, capaian 100%.
4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatancapaian 75% melalui kegiatan :
  - a. Penyusun standar kesehatan, capaian 0%;
  - b. Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan, capaian 100%;
  - c. Pengembangan standar kesehatan (Akreditasi) puskesmas, capaian 100%;
  - d. Pengembangan IKM terhadap pelaksanaan standar pelayanan kesehatan, capaian 100%; dan
  - e. Pengembangan SP@TP SIKDA generic, capaian 75%.
5. Program peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya aparatur kesehatan capaian 81,25% melalui kegiatan :
  - a. Pembangunan/pengembangan sistem informasi aparatur kesehatan, capaian 25%;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi aparatur kesehatan, capaian 100%;
  - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur kesehatan, capaian 100%; dan
  - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan informal bagi aparatur kesehatan, capaian 100%

6. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia capaian 50% melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan, capaian 50%.
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular capaian 71,57% melalui kegiatan :
  - a. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, capaian 75%; dan
  - b. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan penyakit tidak menular, capaian 0%.
8. Program Keluarga Berencana capaian 66,67% melalui kegiatan :
  - a. Pembinaan keluarga berencana, capaian 0%;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB, capaian 100%; dan
  - c. Penyediaan biaya operasional balai penyuluh KB, capaian 100%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.37  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71,41	71,85	72,06	71,61

Berdasarkan tabel diatas angka usia harapan hidup setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan target akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 71,61 maka di tahun 2020 target tersebut sudah melampaui dan diharapkan Pemerintah Kota Singkawang terus berkomitmen untuk meningkatkan angka usia harapan hidup untuk menjadi semakin baik.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Strategi dalam pencapaian indikator angka usia harapan hidup yang telah melebihi pencapaian target yaitu :

- a. Penyuluhan kelas ibu hamil yang dilakukan secara rutin oleh petugas puskesmas di puskesmas dan posyandu.
- b. Bagi kasus ibu yang terindikasi KEK dilaksanakan program tambahan makanan melalui petugas kesehatan di puskesmas dan posyandu.
- c. Melakukan audit maternal terhadap kasus kematian ibu.
- d. Pemerintah Kota Singkawang telah menyiapkan anggaran bagi masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar dalam jaminan kesehatan masyarakat mandiri sebanyak 23.000 jiwa.
- e. Untuk kasus bayi dengan lahir berat badan kurang selalu diberi perhatian khusus oleh petugas puskesmas.
- f. Peningkatan kegiatan pemantuan secara rutin (pemantuan status gizi) bagi seluruh bayi di Posyandu.
- g. Kegiatan sweeping di rumah-rumah penduduk yang terdata mempunyai bayi.
- h. Menggalakan program gerakan masyarakat dengan pola hidup sehat pada seluruh puskesmas.
- i. Menggalakan program jumantik (satu rumah satu kader jumantik) sehingga kasus DBD menurun.

Meskipun capaian target telah melampaui target, masih terdapat hambatan dalam pencapaian strategis ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya refocusing anggaran dalam mengatasi pandemi covid-19, sehingga berdampak pada beban kerja yang sangat tinggi.
- b. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM Kesehatan di lapangan.
- c. Belum optimalnya manajemen perencanaan kesehatan.
- d. Lemahnya dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan peran serta pihak sekolah tentang pentingnya imunisasi.
- e. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam usaha preventif kesehatan.
- f. Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang belum semuanya bersinergi.
- g. Peran serta semua elemen yang ada di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang terhadap program dan kegiatan

kesehatan masih belum optimal, termasuk di UPT Dinas (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

### 13. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pendidikan

#### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.38  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
13	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,78	7,89	101,41
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,9	12,9	100,00
<b>Rata-rata capaian</b>						<b>100.7</b>

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan dirumuskan melalui indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Hasil rilis data BPS Tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah ditargetkan sebesar 7,78 dan realisasinya adalah 7,89 sehingga capaiannya menjadi 101,41%. Sedangkan angka harapan lama sekolah yang ditargetkan 12,9, tahun 2020 ini mencapai 12,9 sehingga capaian menjadi 100,00%. Dari kedua indikator ini rata-rata capaian pada sasaran strategis ini adalah 100,70%.

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.39  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	3.852.766.737	3.421.921.230	88,82	100,70	
	Penyelenggaraan Pendidikan SD	21.976.219.167	21.543.587.229	98,03		
	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	171.094.050	169.676.550	99,17		
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SD	6.025.058.233	5.766.635.850	95,71		
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan	4.197.647.525	4.182.617.225	99,64		

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
	Prasarana SMP					
	Penyelenggaraan Pendidikan SMP	11.597.817.599	10.426.739.848	89,90		
	Pengembangan karakter SD	39.913.752	33.513.750	83,97		
<b>Rata - rata</b>				<b>93,61</b>	<b>100,70</b>	<b>7,09</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93,61% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,70%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya hanya mencapai 7,09%

## 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,70%, terdapat 7 (Tujuh) program yang menunjang dalam pencapaian sasaran ini yaitu:

- a. Program pendidikan anak usia dini.
- b. Program penyelenggaraan pendidikan SD.
- c. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SD.
- e. Program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SMP.
- f. Program penyelenggaraan pendidikan SMP.
- g. Program pengembangan karakter SD.

## b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022

Tabel 3.40  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,57	7,72	7,89	7,38
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,87	12,89	12,9	12,96

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan yang diukur melalui indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah selalu meningkat. Untuk angka rata-rata lama sekolah sudah melampaui target pada akhir masa RPJMD.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh data penduduk tamat sekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA. Indikator rata-rata lama sekolah mencapai target, dipengaruhi oleh:

- a. Program beasiswa bagi masyarakat miskin mulai tingkat SD sampai SMP.
- b. Memberikan bantuan kelengkapan kepada siswa disekolah pinggiran.
- c. Meningkatkan peran guru BK kepada siswa bermasalah.
- d. Menyiapkan ketersediaan guru kelas dalam meningkatkan proses belajar mengajar sehingga mengurangi angka tidak naik kelas.
- e. Pemerintah menyiapkan angkutan sekolah bagi siswa pinggiran.
- f. Pemerintah menyiapkan program pendidikan kesetaraan bagi siswa yang di kelola oleh masyarakat.
- g. Pemerintah menyiapkan atau menambah unit sekolah baru dan fasilitas pendukungnya.
- h. Pemerintah telah menyiapkan sekolah filial (cabang sekolah yang dipersiapkan/diperbantukan pada sekolah induk).
- i. Peran penilik sekolah yang cukup aktif dalam pembinaan kesadaran masyarakat dalam pendidikan.

Meskipun telah mencapai target, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Masih terdapat angka putus sekolah terutama pada jenjang SMP disebabkan oleh faktor ekonomi serta lemahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak.

- b. Aksesibilitas pada wilayah tertentu yang masih sulit untuk dijangkau.
  - c. Kebutuhan guru masih belum tercukupi teruma untuk guru kelas.
2. Indikator angka harapan lama sekolah hampir mencapai target yaitu 100,00%. Angka harapan lama sekolah dipengaruhi oleh lamanya siswa dalam menempuh pendidikan sekolah pada tiap jenjang. Indikator angka harapan lama sekolah mencapai target, dipengaruhi oleh :
- a. Masih terdapat siswa yang pindah/melanjutkan pendidikan ke kota lain sehingga berpengaruh terhadap angka lama sekolah.
  - b. Faktor ekonomi yang menyebabkan putus sekolah siswa pada tingkat tertentu.

Meskipun telah melebihi target, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Masih terdapat angka putus sekolah terutama pada jenjang SMP disebabkan oleh faktor ekonomi serta lemahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak.
- b. Aksesibilitas pada wilayah tertentu yang masih sulit untuk dijangkau.
- c. Kebutuhan guru masih belum tercukupi teruma untuk guru kelas.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan hingga tingkat tertentu dan pada wilayah yang berada di pinggiran.
- b. Peran Pemerintah Pusat dalam pemberian dana BOS.
- c. Memenuhi kebutuhan guru melalui pengangkatan tenaga kontrak dan mengusulkan formasi CPNS.
- d. Pemerintah Kota Singkawang telah menyediakan layanan pendidikan hingga perguruan tinggi .
- e. Melakukan sinergisitas dengan pihak masyarakat/swasta dalam memenuhi sekolah swasta pada jenjang tertentu.

- f. Memberikan bantuan kepada siswa berprestasi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi.

#### 14. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar

Tabel 3.41  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	1	Persentase Jalan mantap (%)	57,5	53,54	93,11
		2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	60	39,17	65,28
		3	Persentase rumah layak huni	91,25	91,17	99,91
		4	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (%)	85,01	88,73	104,38
<b>Rata-rata capaian</b>						90,67

Pada sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dasar terdiri dari 4 (empat) indikator. Indikator pertama adalah persentase jalan mantap dengan target tahun 2020 adalah 57,5, terealisasi sebesar 53,54 dengan capaian adalah 93,11.

Indikator kedua yaitu persentase penduduk berakses air minum terealisasi 39,17 dari target 60% sehingga capaian kinerjanya sebesar 65,28

Indikator ketiga adalah persentase rumah layak huni dengan target tahun 2020 sebesar 91,25% terealisasi sebesar 91,17% dengan capaian kinerja sebesar 99,91%.

Indikator terakhir yaitu luas kawasan permukiman kumuh yang ditargetkan 85,01 pada tahun 2020 terealisasi sebesar 88,73 dengan capaian kinerja sebesar 104,38.

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.42  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Pembangunan jalan dan Jembatan	33.687.388.820	32.982.714.653	97,91	90,67	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8.635.346.943	8.409.916.372	97,38		

	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	454.200.000	453.361.000	99,81		
	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1.125.406.875	1.103.207.275	98,02		
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4.309.655.664	4.295.125.125	99,66		
	Revitalisasi penyediaan air bersih	2.333.000.000	2.321.328.700	99,49		
	Pengembangan perumahan	3.091.769.000	3.084.816.750	99,78		
	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	947.102.800	916.410.900	96,75		
<b>Rata-rata</b>				<b>98,6</b>	<b>90,67</b>	<b>n/a</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,6% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 90,67%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

## **2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam pencapaian sasaran, terdapat 8 program yang menunjang. Pencapaian tiap program telah memenuhi target yaitu 100%, namun pencapaian kinerja belum mencapai 100%. Adapun program kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran ini yaitu:

1. Program Pembangunan jalan dan Jembatancapaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan :
  1. Perencanaan Pembangunan Jalan;
  2. Pembangunan Jalan;
  3. Perencanaan Pembangunan Jembatan;
  4. Peningkatan Jalan; dan
  5. Perencanaan Peningkatan Jalan.
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatancapaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan :
  1. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;
  3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan; dan
  4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan.

3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatancapaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan :
  1. Inspeksi Kondisi Jalan; dan
  2. Survei Kondisi Jalan.
4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bakucapaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan :
  1. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa;
  2. Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa.
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbahcapaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan :
  1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah; dan
  2. Pengembangan Distribusi Air Minum.
6. Program Revitalisasi penyediaan air bersihcapaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Jaringan Air Yang Bersih.
7. Program Pengembangan Perumahancapaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
8. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuhcapaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan :
9. Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat; dan
10. Pencegahan/Peningkatana Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.43  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Jalan mantap (%)	51,36	55,14	53,54	62,30
	Persentase penduduk berakses air minum (%)	38,11	39,74	39,17	75,00

	Persentase rumah layak huni	89,68	90,51	91,17	92,64
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (%)	80,63	84,68	88,73	80,00

Panjang jalan seluruh sepanjang 442,618 km, pada tahun 2018 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 227,32 km, tahun 2019 panjang jalan kondisi baik sepanjang 244,078 km sedangkan pada tahun 2020 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 236,961 km. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentase jalan mantap mengalami penurunan dari tahun 2019, disebabkan karena kondisi ruas jalan mengalami rusak ringan/rusak berat.

Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kenaikan. Jumlah penduduk berakses air minum pada tahun 2020 sebanyak 93.405. Melihat data yang ada pada tahun 2018 jumlah penduduk berakses air minum sebesar 87.065, persentase masyarakat pengguna air bersih terlihat menurun, namun secara jumlah penduduk berakses air minum mengalami peningkatan, meskipun tingkat cakupan masih rendah dari target RPJMD.

Jumlah seluruh rumah layak huni mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebanyak 48.321 rumah, tahun 2019 sebanyak 48.909 dan tahun 2020 sebanyak 49.363 rumah. Sehingga persentase rumah layak huni hingga akhir tahun 2020 mencapai 91,17%.

Luasan permukiman yang tertangani menunjukkan angka yang semakin meningkat. Tahun 2018 tertangani seluas 56,69, pada tahun 2019 seluas 62,69 dan tahun 2020 seluas 65,69. Sehingga pada akhir tahun 2020 luas kawasan yang tertangani mencapai 88,73.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator Persentase Jalan mantap hanya mencapai target 53,54%, hal ini disebabkan :

- a. Adanya refocusing anggaran dalam mengatasi pandemi covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan terlambat.
- b. Terjadinya permasalahan dalam hal pembebasan lahan.
- c. Banyaknya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan/rusak berat tidak dapat terpenuhi permintaan secara tuntas dalam satu ruas.
- d. Belum tersedianya database terhadap kondisi jalan dan jembatan yang update.
- e. Curah hujan yang cukup tinggi, sehingga penyedia cukup sulit untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan kesulitan mendatangkan mobilisasi alat/material.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan negosiasi yang intensif kepada masyarakat pemilik lahan, sekaligus penyuluhan kepada masyarakat pentingnya jalan bagi kepentingan umum.
  - b. Menyusun program/kegiatan yang tepat sasaran, sehingga kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan/rusak berat dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan data yang aktual.
2. Indikator Persentase penduduk berakses air minum belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan :
- a. Menurunnya kualitas dan kuantitas air baku.
  - b. Pemerintah Kota belum dapat menyiapkan jaringan pipa distribusi induk dan tersier pada wilayah permukiman penduduk.
  - c. Adanya refocusing anggaran dalam mengatasi pandemi covid-19, sehingga pengadaan jaringan air bersih tidak mencukupi untuk merealisasikan sesuai perencanaan.
  - d. Adanya curah hujan cukup tinggi, sehingga kesulitan dalam proses pekerjaan dikarenakan lokasi pekerjaan berada pada bukit/gunung.
  - e. Kekurangan sumber air baku.
  - f. Adanya perubahan diameter pipa, dari pipa besar ke diameter pipa kecil, sehingga terdapat penambahan panjang realisasi kinerjanya.

- g. Belum optimalnya pelayanan distribusi air yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap penyediaan air.
- h. Masih terdapat budaya masyarakat yang masih menggunakan sumber air tanah.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan pendekatan dengan masyarakat, melalui sosialisasi akan pentingnya menjaga sumber air baku; dan
  - b. Melakukan peremajaan dan meningkatkan infrastruktur jaringan air bersih pada kawasan yang belum terjangkau;
3. Indikator Persentase rumah layak huni belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan :
- a. Masih kurangnya swadaya masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah layak dan sehat, serta penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya namun tidak seiring dengan bertambahnya jumlah rumah layak huni.
  - b. Pada Tahun 2020 masih terdapat 826 unit rumah tidak layak huni yang masih perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni berdasarkan data usulan yang terverifikasi.
  - c. Belum tersedianya database perumahan yang update dan valid terutama pada rencana pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) yang merupakan salah satu dokumen *masterplan* (Rencana Induk).

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala tersebut, adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak dan sehat secara swadaya.
- b. Penanganan RTLH pada Tahun 2020 menjadi program prioritas nasional dengan dialokasikannya cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) jenis regular sub bidang perumahan dan permukiman. Tahun 2020 Pemerintah Kota Singkawang memperoleh anggaran sebesar Rp. 2.911.369.000,-

- c. Bantuan stimulant pembangunan rumah swadaya (BSRS) atau rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - d. Melaksanakan kegiatan penyusunan/updating rencana pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) dalam rangka penyediaan kebutuhan data perumahan dan rencana induk pengembangan perumahan permukiman.
4. Indikator Luas Kawasan Permukiman Kumuh melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman kumuh sejumlah 74,03 ha (0,15%) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km<sup>2</sup>. Indikator luas kawasan permukiman kumuh pada tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan, masih terdapat 8,34 Ha atau 11,27 % yang belum tertangani dan menjadi target tuntas kumuh 0 %. Luasan perumahan dan permukiman kumuh yang tertangani sampai dengan Tahun 2020 sejumlah 65,69 Ha atau 88,73%.

Indikator luas Kawasan Permukiman Kumuh dapat melebihi target, dikarenakan dalam hal penanganan perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dan menjadi program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam penanganan kawasan kumuh, masih ditemui hambatan yaitu :

1. Masih terdapat hambatan dalam penanganan permukiman kumuh dikarenakan terkait status lahan permukiman.
2. Penanganan perumahan dan permukiman kumuh membutuhkan biaya yang cukup besar dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

## 15. Sasaran Strategis Menurunnya Kawasan Genangan Banjir

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.47  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
15	Menurunnya Kawasan Genangan Banjir	1 Luas Kawasan Genangan Banjir	2.190 Ha	2.198	99,64

Pada sasaran menurunnya kawasan genangan banjir dengan indikator luas kawasan genangan banjir dengan target 2.190. Realisasi target 2020 sebesar 2.198 ha, dengan capaian sebesar 99,64%.

#### 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.48  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Menurunnya Kawasan Genangan Banjir	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	6.533.843.771	6.466.063.788	98,96	99,64	
	Pembangunan Turap/Talud Bronjong	2.229.829.971	2.176.507.770	97,61		
	Pengendalian Banjir	4.358.608.475	4.085.250.400	93,73		
Rata - rata				96,76	99,64	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,76% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,64%, maka tidak terdapat tingkat efisiensi pelaksanaan karena capaian kinerja belum mencapai 100%.

#### 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya mencapai sasaran strategis menurunnya kawasan genangan banjir Pemerintah Kota Singkawang, program kegiatan yang menunjang kegagalan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut:

- ) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong melalui kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan capaian 100%;
- ) Program Pembangunan Turap/Talud Bronjong melalui kegiatan Pembangunan Turap/Talud Bronjong dengan capaian 100%; dan
- ) Program Pengendalian Banjir melalui kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai dengan capaian 100%.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.49  
Perbandingan realisasi kinerja 2018, 2019, 2020 dan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Menurunnya Kawasan Genangan Banjir	Luas Kawasan Genangan Banjir	3.262	4.408	2.198	2.170

Luas kawasan genangan banjir, pada tahun 2018 seluas 3.262 Ha, pada tahun 2019 mengalami peningkatan luasan genangan banjir yang cukup besar yaitu seluas 4.408 Ha dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2.198 Ha. Luas genangan banjir merupakan perbandingan antara luas kawasan genangan banjir berbanding dengan luas wilayah kota Singkawang yaitu seluas 50.400 Ha. Dari data tersebut bahwa luas kawasan genangan banjir masih belum mencapai target RPJMD.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Indikator luas kawasan genangan banjir masih belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh :

1. Adanya refocusing anggaran dalam mengatasi pandemi covid-19, sehingga kegiatan pembangunan turap/talud bronjong tidak mencukupi untuk merealisasikan sesuai perencanaan.

2. Adanya penolakan dari masyarakat untuk dibangun drainase dilahan miliknya.
3. Sungai dan saluran primer untuk pengendalian banjir mengalami pendangkalan.
4. Permukiman warga yang terlalu dekat dengan jalan sehingga sulit dilakukan pembangunan saluran.
5. Terdapat bangunan yang berada pada tepi tebing sungai/saluran.

Dalam penanganan kawasan genangan banjir, dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas-batas wilayah sungai serta pentingnya pemeliharaan lingkungan
2. Sinergisitas program antar perangkat daerah dalam mengatasi permasalahan banjir
3. Adanya pendekatan kepada masyarakat pada sekitar lokasi turap/talud/bronjong sungai untuk tidak menutup atau memperkecil saluran.

## 16. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.50  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
17	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	1 Volume Usaha Perdagangan	Rp.1.544.478.093.900	1.585.562.470.000	102,66

Pada sasaran meningkatnya daya saing sektor perdagangan dengan indikator volume usaha perdagangantarget tahun 2020 adalah Rp.1.544.478.093.900realisasinya adalah Rp.1.585.562.470.000 dengan capaina kinerja sebesar 102,66%.

## 1) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.51  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	372.192.650	337.368.650	90,64	102,66	
	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	599.843.300	544.680.500	90,80		
	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	51.096.200	0	0		
	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	1.951.547.200	1.951.547.200	72,15		
<b>Rata-rata</b>				<b>84,53</b>	<b>102,66</b>	<b>18,13</b>

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 84,53% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 102,66%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 18,13%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

## 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan capaian 100%, melalui kegiatan:
  1. Operasional dan pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah capaian 100%.
  2. Monitoring Produk Pangan.
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan capaian 100%, melalui kegiatan:
  1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk capaian 100%.

2. Pasar Murah capaian 100%.
- c. Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan capaian 100%, melalui kegiatan:
  1. Penataan tempat berusaha bagi PKL.
  2. Penataan Pasar.

Sebagai akibat refocusing anggaran, terdapat 1 program yang ditiadakan yaitu program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

### **b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.52  
Perbandingan realisasi kinerja 2018, 2019, 2020 dan target akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Volume Usaha Perdagangan	Rp. 1.968.185.900.000	Rp. 1.518.260.220.000	1.585.562.470.000	Rp.1.702.787.098.525

Volume usaha perdagangan tahun 2020 menunjukkan peningkatan dari Tahun 2019. Hal ini sangat dipengaruhi oleh bencana akibat pandemi covid. Capaian realisasi Tahun 2020 belum mampu mencapai dari target RPJMD yang telah ditetapkan. Harapan kedepannya pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian kinerja dari sasaran ini.

### **c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Indikator volume usaha perdagangan melebihi target, hal ini disebabkan :

1. Bertambahnya pelaku usaha perdagangan skala mikro kecil.
2. Keikutsertaan Pemerintah Kota Singkawang dalam promosi dagang tingkat nasional sehingga berpengaruh pada geliat usaha perdagangan.
3. Pemerintah berupaya menjaga kenaikan tingkat inflasi dan stabilitas harga yaitu dengan selalu melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok baik ditingkat agen hingga pedagang pengecer, serta

melakukan pemantauan stok barang kebutuhan pokok bersama satgas pangan.

Namun dalam pelaksanaan selalu masih ada permasalahan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan volume usaha perdagangan, antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas manajemen pengelolaan usaha perdagangan skala mikrp kecil.
2. Kelemahan pelaku usaha dalam peluang besar dan memperbesar pangsa pasar.
3. Unit usaha relative sulit dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, khususnya dalam hal pemasaran produk melalui elektronik.

## 18. Sasaran Strategis Berkembangnya Sektor Pariwisata

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.53  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
18	Berkembangnya Sektor Pariwisata	1	Jumlah Kunjungan Wisata	200.000	529,647	264.82
		2	Rata-Rata Lama Tinggal	1.1	0.33	30.00
		Rata-rata				

Pada sasaran berkembangnya sektor pariwisata terdiri dari 2 (dua) indikator. Indikator pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan dengan target tahun 2020 adalah 200.000, Sehingga realisasi target 2020 sebesar 529.647, dengan capaian sebesar 264.82%.

Indikator kedua yaitu rata-rata lama tinggal terealisasi 0.33 dibandingkan dengan target 1.1 sehingga capaiannya adalah 30%.

## 1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.54  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Berkembangnya Sektor Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	630.550.000	549.675.900	87,17	147,41	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.096.865.000	5.012.764.176	98,34		
	Program Pengembangan kemitraan	740.645.000	347.760.000	46,95		
Rata-rata				77,48	147,41	69,93

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 77,48% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 147,41%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 69,93%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

## 2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis berkembangnya sektor pariwisata didukung dengan mengerahkan sumber daya keuangan melalui program sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan capaian 100% Melalui kegiatan :
  1. Pelaksanaan promosi wisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
  2. Fasilitasi perayaan cap go meh 2020.
  3. Pembuatan sistem informasi perhotelan berbasis web dan maintenance web pas ke singkawang.
  4. Ramadan fair.
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata capaian 100% melalui kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Adapun program/kegiatan yang capaian tidak mencapai 100%, yang berpengaruh dalam pencapaian kinerja, yaitu:

- a. Program Pengembangan Kemitraan capaian 80% melalui kegiatan :
  1. Fasilitasi pelatihan SDM Pariwisata.
  2. Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona.
  3. Gathering generasi pesona Indonesia.

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022**

Tabel 3.55  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			TARGET RPJMD
		2018	2019	2020	
Berkembangnya Sektor Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	721.967	722.932	529,647	1.000.000
	Rata-rata Lama Tinggal	1,14	1,14	0.33	3.00

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang Tahun 2020 menunjukkan penurunan dari Tahun 2018 dan Tahun 2019. Hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi pandemic covid yang terjadi pada sepanjang tahun 2020. Untuk indikator rata-rata lama tinggal wisatawan untuk menetap di Kota Singkawang belum menunjukkan lama tinggal melebihi 1 hari.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

1. Indikator jumlah kunjungan wisata dipengaruhi oleh pelaksanaan event, jumlah destinasi yang seiring dengan pengembangan destinasi wisata, tradisi budaya, brand image Kota Singkawang sebagai kota Wisata di Kalimantan Barat. Jumlah kunjungan wisata pada saat awal tahun 2020 mencapai hingga 231.635 orang, namun pada saat bulan maret hingga bulan juli mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi covid-19, tetapi pada bulan agustus kembali mengalami kenaikan jumlah pengunjung yang diakibatkan adanya kebijakan baru pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan kebijakan menerapkan protokol kesehatan, sehingga pemerintah daerah sangat intens dalam memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan para wisatawan agar tetap berwisata secara aman.

2. Indikator rata-rata lama tinggal belum memenuhi target capaiannya hanya sebesar 0,33% hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kunjungan tamu pada hotel-hotel yang ada di Kota Singkawang mengalami penurunan, Indikator rata-rata lama tinggal berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan yang begitu besar namun belum mencapai target RPJMD, yang mana rata-rata kunjungan wisatawan hanya mengunjungi tempat-tempat wisata tanpa menginap.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Kerangka pendanaan yang digunakan dalam pembangunan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dan dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi serta target pembangunan nasional.

### **1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Singkawang. Adapun realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56  
Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah TA 2020

KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>843.115.014.197,00</b>	<b>826.132.859.351,42</b>	<b>97,99</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>179.478.666.800,00</b>	<b>163.404.476.676,64</b>	<b>91,04</b>
4.1.1	Pajak Daerah	45.342.000.000,00	48.290.277.485,26	106,50
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.312.000.000,00	6.254.390.732,00	99,09
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.200.000.000,00	6.651.518.042,00	127,91
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	122.624.666.800,00	102.208.290.417,38	83,35
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>575.268.284.807,00</b>	<b>575.518.153.068,00</b>	<b>100,04</b>
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	14.817.097.000,00	19.553.583.383,00	131,97
4.2.2	Dana Alokasi Umum	467.470.514.000,00	465.326.232.000,00	99,54
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	92.980.673.807,00	90.638.337.685,00	97,48
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>88.368.062.590,00</b>	<b>87.210.229.606,78</b>	<b>98,69</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	25.672.200.000	25.771.890.000,00	100,39
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.291.203.590,00	54.014.823.669,00	97,69
4.3.7	Pendapatan Lainnya	-	18.856.937,78	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>843.115.014.197,00</b>	<b>826.132.859.351,42</b>	<b>97,99</b>

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

## 2. Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Singkawang dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan berbasis kinerja yang sangat bermanfaat bagi proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.

Tabel 3.57  
Realisasi Belanja Daerah TA 2020

KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>950.221.280.100,17</b>	<b>848.046.719.131,75</b>	<b>89,25</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>425.480.805.003,78</b>	<b>377.645.125.900,00</b>	<b>88,76</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	367.843.426.236,07	327.913.984.686,00	89,14
5.1.4.	Belanja Hibah	15.328.700.000,00	14.978.203.436,00	97,71
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.824.548.000,00	1.615.096.000,00	88,52
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan ParPol	907.417.740,00	907.417.740,00	100,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	39.576.713.027,71	32.230.424.038,00	81,44
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>524.740.475.096,39</b>	<b>470.401.593.231,75</b>	<b>89,64</b>
5.2.1.	Belanja Pegawai	102.802.655.178,00	87.592.175.688,00	85,20
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	239.485.203.103,39	213.224.647.646,75	89,03
5.2.3.	Belanja Modal	182.452.616.815,00	169.584.769.897,00	92,95
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(107.106.265.903,17)</b>	<b>(21.913.859.780,33)</b>	<b>20,46</b>

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

### 3. Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan aparatur dan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.58  
Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2020

KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>107.106.265.903,17</b>	<b>79.356.265.903,17</b>	<b>74,09</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>116.356.265.903,17</b>	<b>87.356.265.903,17</b>	<b>100,00</b>
6.1.1.	Penggunaan SiLPA	87.356.265.903,17	87.356.265.903,17	100,00
6.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	29.000.000.000,00	-	-
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.250.000.000,00</b>	<b>8.000.000.000,00</b>	<b>86,49</b>
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	9.250.000.000,00	8.000.000.000,00	86,49
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>107.106.265.903,17</b>	<b>79.356.265.903,17</b>	<b>74,09</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>57.442.406.122,84</b>	<b>-</b>

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

## **BAB IV PENUTUP**

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Singkawang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis. Berdasarkan hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 33 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama, dapat di simpulkan bahwa:

- ) 13 indikator (39,39 %) dengan capaian kinerja lebih dari 100%.
- ) 13 indikator (39,39%) dengan capaian kinerja antara 75% - 100%.
- ) 2 indikator (6,06%) dengan capaian kinerja antara 55% - 74%.
- ) 3 indikator (9,09%) dengan capaian kinerja kurang dari 55%.
- ) 2 indikator (6,06%) yang belum dapat dihitung capaian kinerjanya karena belum rilis atau ditetapkan oleh instansi penilai.

Meskipun pada beberapa inidkator masih belum mencapai target akan tetapi secara keseluruhan capain kinerja Pemerintah Kota Singkawang tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun indikator yang belum mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Volume usaha koperasi dengan capaian 87,80%
2. Nilai PDRB Sektor Industri dengan capaian 95,12%
3. Angka pengangguran terbuka dengan capaian 84,85%
4. Nilai PDRB sektor pertanian dengan capaian 13,43%
5. Nilai PDRB sektor perikanan dengan capaian -5,05%
6. Indeks kualitas air dengan capaian 99,26%
7. Indeks tutupan lahan dengan capaian 95,15%
8. Indeks kepuasan masyarakat dengan capaian 93,04%
9. Nilai LPPD predikat tinggi dari target Sangat Tinggi
10. Nilai SAKIP masih predikat B dari target BB
11. Persentase jalan mantap dengan capaian 93,11%
12. Persentase penduduk berakses air minum dengan capaian 65,28%
13. Luas Kawasan Genangan Banjir dengan capaian 99,64%

#### 14. Rata-rata lama tinggal dengan capaian 30%

Permasalahan dan solusi terhadap beberapa indikator yang belum mencapai target secara rinci telah dibahas dalam Bab sebelumnya dan disimpulkan secara umum sebagai berikut:

##### 1. Volume usaha koperasi.

Lemahnya SDM kepengurusan koperasi dan SDM pembina koperasi, memberi pengaruh terhadap pengelolaan koperasi, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan, pendampingan, fasilitasi serta peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi maupun SDM Pembina koperasi.

##### 2. Nilai PDRB Sektor Industri

Masih rendahnya kualitas daya saing produk IKM dalam menghadapi pasar nasional, kurangnya sarana dan prasarana usaha dan penguasaan teknologi bagi pelaku IKM, belum optimalnya manajemen keuangan pada kelompok serta keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pelaku IKM dengan pasar modern terkait sistem pemasaran.

##### 3. Angka pengangguran terbuka.

Berkurangnya lapangan kerja yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang memberikan dampak sangat besar terhadap tingkat pengangguran serta ketidaksesuaian antara lapangan kerja dan keahlian maupun pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan pendataan terkait lapangan usaha yang mengalami penutupan atau pengurangan tenaga kerja/PHK.

##### 4. Nilai PDRB sektor pertanian

Dampak dari pandemi covid turut membuat PDRB sektor pertanian terkena dampak, selain itu juga terdapat banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau non pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan yang merusak tekstur alami lahan pertanian.

##### 5. Nilai PDRB sektor perikanan.

Belum optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumberdaya alam (SDA) perikanan, masih kurangnya pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan, minimnya bahan baku untuk

pengolahan, dikarenakan masih mengandalkan produksi ikan yang bersifat musiman, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani urusan perikanan, serta belum semua pelaku usaha perikanan bergabung didalam kelompok /koperasi perikanan

6. Indeks kualitas air.

Belum terintegrasinya sistem pengelolaan limbah domestik rumah tangga serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air minum, sehingga pemerintah perlu melakukan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan.

7. Indeks Tutupan Lahan.

Adanya alih fungsi lahan, abrasi pantai, penebangan liar dan kebakaran hutan dan lahan, sehingga Pemerintah perlu melaksanakan himbauan kepada masyarakat, membentuk kelompok masyarakat peduli, penghijauan serta rehabilitasi hutan dan pantai.

8. Indeks kepuasan masyarakat.

Lemahnya komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap survey kepuasan masyarakat.

9. Nilai LPPD

Adanya perubahan indikator dalam penilaian berdasarkan kategori yaitu pemerintah daerah maju, sedang dan terbelakang. Pemerintah Kota Singkawang masuk kategori sedang serta data dukung indikator kinerja kunci yang disampaikan perangkat daerah berubah-ubah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali terhadap pengisian data kepada petugas pengelola LPPD perangkat daerah.

10. Nilai SAKIP

Kelemahan dalam perencanaan termasuk penetapan target, komitmen dan pemahaman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran serta pelaksanaan evaluasi yang belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dan menjadi bahan dalam

perencanaan tahun berikutnya serta belum padunya sebagian Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran strategis, sehingga Pemerintah perlu melakukan pendampingan, evaluasi terhadap dokumen perencanaan serta keseriusan dalam proses penyusunan perencanaan tahunan.

11. Persentase jalan mantap.

Keterbatasan anggaran untuk dapat memenuhi permintaan secara tuntas untuk memperbaiki kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan/rusak berat dalam satu ruas, adanya permasalahan dalam pembebasan lahan serta belum tersedianya database terhadap kondisi jalan dan jembatan, sehingga perlu dilakukan penyusunan program/kegiatan yang tepat sasaran untuk mengatasi kondisi ruas jalan yang rusak ringan/rusak berat sesuai data yang actual dan melakukan sosialisasi dan negosiasi yang intensif kepada masyarakat pemilik lahan.

12. Persentase penduduk berakses air minum

Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menyiapkan jaringan pipa distribusi, pendapatan masyarakat serta budaya masyarakat sehingga perlu meningkatkan penyertaan modal kepada perusahaan daerah serta meningkatkan infrastruktur jaringan air.

13. Luas Kawasan Genangan Banjir

Peningkatan pembangunan kawasan tertentu, belum optimal fungsi saluran serta kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan sehingga perlu dilaksanakan identifikasi saluran yang mengalami penyumbatan, normalisasi saluran dan menyiapkan alternatif kolam retensi sebagai pengendali banjir.

14. Rata-rata lama tinggal

Adanya penurunan jumlah kunjungan tamu yang diakibat oleh pandemi covid-19, sehingga pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan wisatawan dengan menyiapkan regulasi atau kebijakan terkait kunjungan wisatawan agar dapat berwisata secara aman dengan menerapkan protokol kesehatan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022 khususnya tahun 2020, dapat dipenuhi. Jika

terdapat indikator sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara bersinergi antar berbagai pihak.

Singkawang, Maret 2021  
Wali Kota Singkawang,



**TJHAI CHUI MIE, S.E, M.H**

---

# LAMPIRAN

---

Laporan Kinerja  
Pemerintah Kota  
Singkawang

---

Tahun 2020

---



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota dan Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
7. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan yang diatur sesuai undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan,

dan/ kesusilaan.

8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen yang khususnya membandingkan tingkat kinerja yang mencapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.
14. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program;
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah pada masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
17. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
18. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari satu program yang merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
19. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
20. Indikator Kinerja Utama (*key performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan Organisasi dalam mencapai suatu sasaran strategis.
21. Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang yang selanjutnya disebut IKU Kota adalah IKU yang disusun oleh tim dan ditetapkan oleh Wali Kota Singkawang.
22. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah IKU yang disusun oleh perangkat daerah dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.
23. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENETAPAN IKU

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang adalah:

- a. untuk memperoleh informasi yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Penetapan IKU adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang selaku organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III

#### PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN IKU

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang wajib menyusun dan menetapkan IKU.
- (2) IKU pada tingkatan perangkat daerah meliputi indikator kinerja hasil (*outcome*) serta merupakan komitmen ukuran pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan kinerja perangkat daerah yang disusun dan diusulkan perangkat daerah untuk selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) IKU pada tingkat Pemerintah Daerah merupakan indikator pengukur yang dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kota sesuai dengan sasaran strategis pada rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan oleh Wali Kota.

### Pasal 5

- (1) Pemilihan IKU sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
  - a. keselarasan indikator antar tingkatan unit organisasi, sejalan dan selaras dengan indikator tingkat Pemerintah Kota;
  - b. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang dianggap masih relevan;
  - c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
  - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - e. kebutuhan data statistik pemerintah kota; dan
  - f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai guna pengukuran kinerja suatu perangkat daerah dan memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan yang dapat dikuantifikasi dan diukur.

#### Pasal 6

- (1) Pengembangan dan penetapan IKU wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Dalam hal IKU tingkat perangkat daerah yang telah ditetapkan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, kepala perangkat daerah melaporkan hambatan yang ada kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pengembangan dan perbaikan IKU perangkat daerah.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN, PENERAPAN DAN EVALUASI IKU

#### Pasal 7

IKU Kota dan IKU Perangkat Daerah digunakan untuk:

- a. bahan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
- b. bahan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja berjenjang;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

#### Pasal 8

- (1) Penerapan IKU Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perangkat Daerah dalam penerapan IKU perangkat daerah agar searah dan selaras dengan IKU Kota.
- (3) Perangkat daerah penanggung jawab IKU Kota sebagaimana tercantum dalam lajur empat Lampiran Peraturan Wali Kota ini selaku perangkat daerah pengampu tugas berkewajiban menghimpun, mengolah, dan melaporkan pencapaian IKU Kota yang menjadi tanggung jawabnya.

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi IKU untuk tujuan tertentu dapat dilakukan terhadap hal:
  - a. tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. terdapat perubahan arah kebijakan Pemerintah Kota dalam menentukan arah pembangunan;
  - c. terdapat perubahan program dan kegiatan yang secara *output* dan *oucome* sebagai pendukung capaian IKU; dan
  - d. IKU tingkat perangkat daerah yang telah ditetapkan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.
- (2) Evaluasi IKU Kota dan IKU Perangkat Daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Wali Kota dari unsur Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah dan perangkat daerah lainnya yang secara langsung berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

## BAB V

### KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Koordinasi dan pengembangan dalam penetapan IKU di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 9 April 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd  
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH  
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

1. Visi Organisasi : Singkawang Hebat 2022
2. Misi :
  1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
  2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
  3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
  4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan *Public* yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
  5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Sehat;
  6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan;
  7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Indeks Toleransi	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang kondusif dan toleran	1	Angka Kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Singkawang dan BPS	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
				2	Angka Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Singkawang dan BPS	$\frac{\text{Jumlah konflik tahun } n - 1}{\text{Jumlah konflik tahun } n} \times 100$
		Persentase peningkatan seni dan budaya yang lestari	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	1	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dimiliki daerah}} \times 100$
2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya daya saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	1	Volume Usaha Koperasi	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	Jumlah penjualan atau pendapatan Koperasi
				2	Volume Usaha UMKM	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	Jumlah penjualan atau pendapatan UMKM
				3	Nilai PDRB sektor industri	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi, BAPPEDA dan BPS	Kontribusi sektor Industri pada PDRB
				4	Cakupan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah subsektor yang ditangani}}{\text{Jumlah total subsektor kota}} \times 100$

						Industri dan Koperasi		
			Meningkatnya investasi daerah	1	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dan BPS	$\frac{(\text{Realisasi Investasi } \frac{PMDN}{PMA} \text{ tahun evaluasi} - \text{Realisasi Investasi } \frac{PMDN}{PMA} \text{ tahun sebelumnya})}{\text{Realisasi Investasi } \frac{PMDN}{PMA} \text{ tahun sebelumnya}} \times 100$
			Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dan BPS	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100$
				2	Angka Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
3	Meningkatkan potensi sumber daya pertanian dan perikanan	Persentase PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	1	Persentase PDRB Sektor Pertanian	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BAPPEDA dan BPS	$\frac{(\text{Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB tahun } n - \text{Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB tahun } n - 1)}{\text{Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB tahun } n - 1} \times 100$
		Persentase PDRB Sektor Perikanan		2	Persentase PDRB Sektor Perikanan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, BAPPEDA dan BPS	$\frac{(\text{Kontribusi Sektor Perikanan pada PDRB tahun } n - \text{Kontribusi Sektor Perikanan pada PDRB tahun } n - 1)}{\text{Kontribusi Sektor Perikanan pada PDRB tahun } n - 1} \times 100$

		Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Persentase Angka Kecukupan Gizi x Bobot Masing-masing Kelompok Pangan																									
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	$PI_j = \sqrt{\frac{(\frac{C_{ij}}{L_{ij}})^2 \text{rata-rata} + (\frac{C_{ij}}{L_{ij}})^2 \text{maksimum}}{2}}$ <i>dimana</i> $0 \leq c \leq 1,0$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0$ cemar sedang $PI_j > 10,0$ cemar berat																									
				2	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	$IKU = 100 - (\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1))$																									
				3	Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$																									
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah, Perpustakaan Daerah, BKPSDM, RSUD, Kecamatan	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsut}}{\text{Total unsur yang tersaji}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}{\text{penimbang}}$ <p>Dimana:            Bobot nilai rata-rata = <math>\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071</math>            terimbang</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:            IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik
				NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																									
				1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak baik																									
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang baik																													
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																													
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik																													
2	Indeks SPBE	Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SPBE Pemerintah Kota Singkawang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																													
3	Nilai LPPD	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Hasil Penilaian LPPD oleh Kemendagri																													

			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	<i>Hasil Penilaian Laporan Angkutabilitas Kinerja Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</i>
				2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	<i>Opini BPK pada hasil audit terhadap laporan keuangan daerah pada tahun n</i>
				1	Maturitas SPIP	Inspektur Kota	Inspektur Kota	<i>Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</i>
6	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup	Dinas Kesehatan dan KB	Dinas Kesehatan dan KB	$\frac{\text{Jumlah kumulatif usia meninggal}}{\text{Jumlah yang meninggal}}$
			Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka harapan lama sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<i>Proyeksi Angka Harapan Lama Sekolah dari BPS</i>
				2	Angka rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah tahun pendidikan Penduduk usia 15 ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1	Persentase jalan mantap (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100$
				2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
				3	Persentase rumah layak huni (%)	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100$
				4	Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani (%)	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	$\frac{\text{Luasan Pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luasan permukiman kumuh yang ditetapkan}} \times 100$

			Menurunnya kawasan genangan banjir	1	Luas kawasan genangan banjir (ha)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	<i>Jumlah luas seluruh kawasan yang tergenang banjir</i>
8	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata	PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1	Volume usaha perdagangan	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	<i>Jumlah penjualan atau pendapatan perdagangan</i>
		PAD Sektor Pariwisata	Berkembangnya sektor pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	<i>Jumlah kunjungan wisata</i>
				2	Rata-rata lama tinggal	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	<i>Rata-rata kunjungan wisata dalam 1 tahun</i>

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002



WALIKOTA SINGKAWANG  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.  
Jabatan : Walikota Singkawang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Singkawang, November 2020

WALIKOTA SINGKAWANG  
  
TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	2	3		4
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif dan toleran	1	Angka Kriminalitas	17
		2	Angka Konflik	0
2	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	1	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang lestari	80,3
3	Meningkatnya daya saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	1	Volume Usaha Koperasi	270.728.937.000
		2	Volume Usaha UMKM	691.340.861.600
		3	Nilai PDRB sektor industri	1.007.052.947.775
		4	Cakupan Ekonomi Kreatif	56,25
4	Meningkatnya investasi daerah	1	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	5,00
5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,45
		2	Angka Kemiskinan	5,00
6	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian	3,50
		2	Nilai PDRB Sektor Perikanan	1,98
7	Meningkatnya ketahanan pangan dan daerah	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,00
8	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Air	80,6
		2	Indeks Kualitas Udara	85,6
		3	Indeks Tutupan Lahan	31,75
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
		2	Nilai LPPD	Sangat Tinggi
		3	Nilai SPBE	2 (cukup)
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Nilai SAKIP	BB
		2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	2	3		4
11	Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal	1	Maturitas SPIP	Level 3
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Usia Harapan Hidup	71,89
13	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,9
		2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,78
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1	Persentase jalan mantap	57,5
		2	Persentase penduduk berakses air minum	60
		3	Persentase rumah layak huni	91,25
		4	Luas kawasan pemukiman kumuh yang ditangani	85,01
15	Menurunnya kawasan genangan banjir	1	Luas kawasan genangan banjir	3,7%/2.190 Ha
16	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1	Volume usaha perdagangan	1.544.478.093.900
17	Berkembangnya sektor pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	200.000 orang
		2	Rata-rata lama tinggal	1,1 hari

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
<b>A</b>	<b>Sasaran Terwujudnya Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dan Toleran</b>	<b>387.091.400</b>
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	345.618.225
2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	-
3	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-
4	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-
5	Program Penerapan dan Penegakan Hukum	-
6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-
7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	14.556.150
8	Program Pengembangan Pendidikan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat	14.681.500
9	Program Pembauran dan Ketahanan Bangsa	-
10	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	12.235.525
<b>B</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kelestarian Budaya</b>	<b>288.968.000</b>
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	44.918.000
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	212.010.000
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	32.040.000
<b>C</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Daya Saing koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>2.547.726.085</b>
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	417.358.000
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	39.470.200
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	192.077.400
4	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	387.643.500
5	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	155.939.000
6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	330.559.000
7	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	-
8	Program Penataan Struktur Industri	659.599.400
9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	365.079.585
<b>D</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah</b>	<b>1.681.912.648</b>
1	Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi	162.720.600
2	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.519.192.048
<b>E</b>	<b>Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan</b>	<b>2.606.558.865</b>
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	210.546.000
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	41.289.525
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50.185.100
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.067.215.190
5	Program Pembinaan Anak terlantar	12.806.500
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	-
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	15.000.000
8	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	97.713.650
9	Program Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	-
10	Program Pemberdayaan Masyarakat	-
11	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	64.736.000
12	Program Penguatan Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	-
13	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	47.066.900

1	2	3
<b>F</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Yang Berkontribusi Terhadap Perekonomian Daerah</b>	<b>7.805.981.340</b>
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3.015.000
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.809.721.500
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	61.630.000
5	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	120.074.100
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	857.952.490
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	212.375.000
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	92.700.000
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-
11	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-
12	Program Penyuluhan Pertanian	-
13	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-
9	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	930.000
10	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.068.370.750
11	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.284.570.350
12	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	294.642.150
<b>G</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah</b>	<b>62.824.000</b>
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	62.824.000
<b>H</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan</b>	<b>8.187.416.753</b>
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.508.467.211
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	540.358.867
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	109.685.500
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	46.431.750
5	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup	44.673.300
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	-
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	-
10	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	-
11	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-
12	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-
13	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-
14	Program Pengelolaan Sampah	-
6	Program Perencanaan Tata Ruang	1.079.350.900
7	Program Pemanfaatan Ruang	1.398.316.425
8	Program pengendalian pemanfaatan ruang	460.132.800
<b>I</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<b>131.928.728.098</b>
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.262.373.700
2	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	-
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	-

1	2	3
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	281.034.550
6	Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi	32.178.550
7	Program Pengembangan Kinerja Organisasi	118.732.500
8	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	190.359.225
9	Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov	4.268.637.685
10	Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	121.587.750
11	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	62.178.100
12	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-
13	Program Kerjasama informasi dan Media Massa	652.793.900
14	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	169.430.700
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Persandian	43.021.800
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	9.138.800
17	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	70.489.500
18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	196.489.500
19	Program Pengelolaan Manajemen Pelayanan Kesehatan	101.000.000.000
20	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	1.852.754.690
21	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ rumah sakit Paru-paru/ rumah Sakit Mata	19.048.828.600
22	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	23.607.000
23	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	-
24	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	187.928.500
25	Program Pengembangan Inovasi Daerah Dalam Pelayanan Perpustakaan	-
26	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	621.426.848
27	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.715.736.200
<b>J</b>	<b>Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan</b>	<b>11.427.244.386</b>
1	Program Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	863.486.650
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.390.644.572
3	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	46.580.000
4	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	90.810.000
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-
6	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-
7	Program Perencanaan Fisik Prasarana dan Tata ruang Wilayah	-
8	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	489.233.900
10	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-
11	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	346.196.475
12	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	126.340.200
13	Program penelitian dan pengembangan bidang fisik sarana prasarana dan tata ruang wilayah	128.169.525
14	Program Pengembangan Data/Informasi	-
15	Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	1.898.896.750
16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-
17	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	5.046.886.314

1	2	3
<b>K</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Internal</b>	<b>1.821.477.070</b>
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1.599.315.170
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	87.743.800
3	Program Penegakan Integritas	86.770.400
4	Program Pengawasan Reformasi Birokrasi	47.647.700
<b>L</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</b>	<b>44.027.406.451</b>
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.045.884.850
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.420.451.700
3	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Pangan	-
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	141.916.350
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	140.067.600
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	63.399.500
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	934.373.350
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	192.709.500
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.272.800.000
10	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	3.008.194.700
11	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	58.415.800
12	Program Pengelolaan Manajemen Pelayanan Kesehatan	-
13	Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur Kesehatan	476.857.000
14	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	18.226.529.551
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	-
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	19.374.550
17	Program Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan	56.291.000
18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-
20	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	-
21	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-
18	Program Keluarga Berencana	1.940.141.000
19	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	-
20	Program Pengendalian Penduduk	30.000.000
<b>M</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	<b>49.817.746.911</b>
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.852.766.737
2	Program Penyelenggaraan Pendidikan SD	21.976.219.167
3	Program Penyelenggaraan Pendidikan SMP	11.597.817.599
4	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan SD	6.025.058.233
5	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP	4.197.647.525
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	171.094.050
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	42.938.000
8	Program Pendidikan Non Formal	1.954.205.600
<b>N</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar</b>	<b>100.193.921.536</b>
1	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	33.687.388.820
2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	8.635.346.943
3	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	454.200.000

1	2	3
4	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	1.125.406.875
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	4.309.655.664
6	Program Revitalisasi Penyediaan Air Bersih	2.333.000.000
7	Program Pembangunan Infrastruktur Bangunan Pemerintah	25.023.290.234
8	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2.716.174.500
9	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	525.710.525
10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2.834.553.375
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.457.222.800
12	Program Pengembangan Perumahan	16.144.869.000
13	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	947.102.800
<b>0</b>	<b>Sasaran Menurunnya Kawasan Genangan Banjir</b>	<b>13.122.282.217</b>
1	Program Pengendalian Banjir	4.358.608.475
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	6.533.843.771
3	Program Pembangunan Turap/Talud Bronjong	2.229.829.971
<b>P</b>	<b>Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan</b>	<b>2.974.679.350</b>
1	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	372.192.650
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	599.843.300
3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asonian	51.096.200
4	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	1.951.547.200
<b>Q</b>	<b>Sasaran Berkembangnya Sektor Pariwisata</b>	<b>6.468.060.000</b>
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	630.550.000
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.096.865.000
3	Program Penataan Kawasan Pariwisata Terpadu	-
4	Program Pengembangan Kemitraan	740.645.000
	<b>TOTAL</b>	<b>385.350.025.110,00</b>

Singawang, November 2020



**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH SINGKAWANG  
TAHUN 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dan Toleran	Angka Kriminalitas	17	8,72	194,95
		Angka Konflik	0	0	100,00
2	Meningkatnya pengembangan dan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	80,3	100	124,53
3	Meningkatnya Daya Saing koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	Volume usaha koperasi	270.728.937.000	237.699.347.613	87,80
		Volume usaha umkm	691.340.861.600	753.658.510.097	109,01
		Nilai PDRB sektor industri	1.007.052.947.775	957.880.000.000	95,12
		Cakupan Ekonomi Kreatif	56,25	100	177,78
4	Meningkatnya investasi daerah	Persentase pertumbuhan nilai Realisasi PMDN dan PMA	5	64,19	1283,80
5	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	7,45	8,78	84,85
		Angka kemiskinan	5	4,53	110,38
6	Meningkatnya produksi Pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	Nilai PDRB sektor Pertanian (%)	3,5	0,47	13,43
		Nilai PDRB Sektor perikanan (%)	1,98	-0,1	-5,05
7	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82	82,89	101,09
8	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	80,6	80	99,26
		Indeks kualitas udara	85,6	85,56	99,95
		Indeks tutupan lahan	31,75	30,21	95,15

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan masyarakat	90	83,74	93,04
		Nilai LPPD	Sangat tinggi	Tinggi	Belum Berhasil
		Indeks SPBE	2	3,82	191,00
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BB	n/a	n/a
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	n/a	n/a
11	Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100,00
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71,89	72,06	100,24
13	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,78	7,89	101,41
		Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,9	12,9	100,00
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Persentase Jalan mantap (%)	57,5	53,54	93,11
		Persentase penduduk berakses air minum (%)	60	39,17	65,28
		Persentase rumah layak huni	91,25	91,17	99,91
		Luas Kawasan Permukiman Kumuh (%)	85,01	88,73	104,38
15	Menurunnya kawasan genangan banjir	Luas kawasan genangan banjir	2.190	2198	99,64
16	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	volume usaha perdagangan	1.544.478.093.900	1.585.562.470.000	102,66
17	Berkembangnya sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	200.000	529.647	264,82
		rata-rata lama tinggal	1,1	0,33	30,00